



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017



**Bagian Organisasi Setdako
Tahun 2018**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan St. Syahrir.No.238.☎ (0752). 84506. Padang Panjang
email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk tahun anggaran 2017 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 27 Maret 2018

Inspektur Daerah Kota Padang Panjang


ERVIC RINALDY,SH
NIP.19610513 198810 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dari Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Padang Panjang Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi pemerintah kota padang panjang merupakan implementasi tahun kelima Peraturan Daerah Kota Padang panjang nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota padang Panjang Tahun 2013 – 2018

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah kota padang Panjang tahun 2017 merupakan salah satu bentuk implementasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas wewenang Pemerintah Kota padang Panjang kepada Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berlandaskan kepada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, teknis Penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. sekaitan dengan itu, daam laporan ini disajikan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran kinerja yang terdapat pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah kota padang Panjang tahun 2017, dimana selama tahun 2017 capaian kinerja yang telah ditergetkan secara umum telah berhasil dicapai dengan baik.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang sehingga Kota Padang Panjang dapat mewujudkan capaian kinerja yang dibutuhkan. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang Panjang, 27 Maret 2018

Pjs Walikota Padang Panjang



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
D. Capaian Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang	7
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	14
F. Sistematika Penyusunan.	14

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2013 – 2018	16
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
C. Perjanjian Kinerja	27

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang	32
B. Realisasi Keuangan	101

BAB 4 PENUTUP

Kesimpulan	115
------------	-----

LAMPIRAN



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang ini berdasarkan pada amanat Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Selain itu pula penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Padang Panjang, berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 061/31/WAKO-PP/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 061/198/WAKO-PP/2015 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, serta Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 adalah Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2013-2018 .

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2017;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017;

Secara administrasi Kota Padang Panjang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas 2300 Ha, masing-masing kecamatan memiliki delapan kelurahan. Padang Panjang memiliki topografi bergelombang dan terletak pada dataran tinggi yang menyebabkan daerah ini terkenal dengan iklim sejuknya dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter dari permukaan laut, diapit oleh tiga gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat serta memiliki curah hujan selama 2016 mencapai 3.801,7 mm.

Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilaksanakan pada Tahun 2016 adalah 51.712, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 25.812 dan penduduk perempuan 25.900. Berikut ini rincian perkiraan jumlah penduduk Kota Padang Panjang per Kecamatan tahun 2016, yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Padang Panjang Barat		14.364	14.513	28.877
		Silaing Bawah	2.504	2.678	5.182
		Silaing Atas	1.089	965	2.054
		Pasar Usang	1.805	2.121	3.926
		Kampung Manggis	2.895	2.696	5.591
		Tanah Hitam	1.597	1.608	3.205
		Pasar Baru	682	635	1.317
		Bukit Surungan	1.162	1.097	2.259
		Balai-Balai	2.630	2.713	5.343
2.	Padang Panjang Timur		11.448	11.387	22.835
		Koto Panjang	2.484	2.353	4.837
		Koto Katik	439	433	872
		Ngalau	1.351	1.346	2.697
		Ekor Lubuk	1.235	1.183	2.418
		Sigando	763	736	1.499
		Ganting	1.036	1.084	2.120
		Guguk Malintang	3.193	3.378	6.571
		Tanah Pak Lambik	947	874	1.821

Sumber : Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2017

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Tabel 1.2
Luas wilayah, penduduk, dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan/kelurahan
di Kota Padang Panjang

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah	Penduduk	Kepadatan
1.	Padang Panjang Barat		9,75	28.877	2.962
		Silaing Bawah	2,61	5.182	1.985
		Silaing Atas	0,54	2.054	3.804
		Pasar Usang	0,59	3.926	6.654
		Kampung Manggis	3,16	5.591	1.769
		Tanah Hitam	0,72	3.205	4.451
		Pasar Baru	0,23	1.317	5.726
		Bukit Surungan	1,21	2.259	1.867
		Balai-Balai	0,69	5.343	7.743
2.	Padang Panjang Timur		12,95	22.835	1.732
		Koto Panjang	1,33	4.837	3.637
		Koto Katik	1,01	872	863
		Ngalau	1,45	2.697	1.860
		Ekor Lubuk	2,8	2.418	864
		Sigando	1,1	1.499	1.071
		Ganting	3,1	2.120	684
		Guguk Malintang	1,9	6.571	3.458
		Tanah Pak Lambik	0,26	1.821	7.004

Sumber : Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2017

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat **SLTA/sederajat** dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan
Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang 2016

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/belum pernah sekolah	0,00	0,16	0,08
tidak/belum tamat SD	13,16	12,13	12,64
SD/ sederajat	19,97	16,54	18,25
SLTP/ sederajat	10,43	17,67	14,05
SLTA/ sederajat	42,87	31,12	37, 49
Diploma I/II/III	3,17	6,88	5,03
Diploma IV/S1	8,59	13,32	10,95
S2/S3	1,82	1,19	1,5

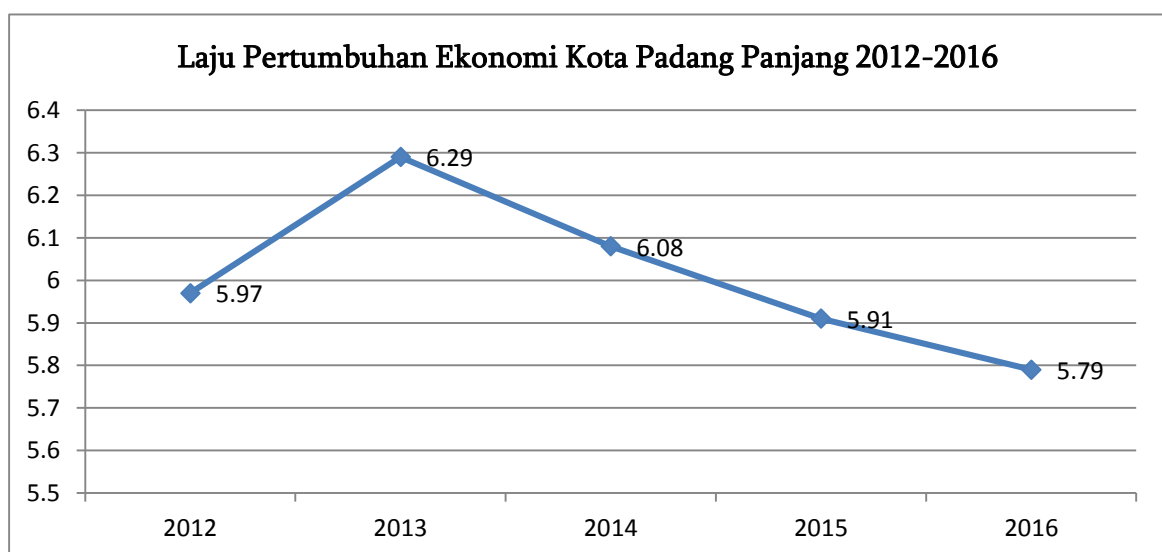
Sumber : Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2017

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Padang Panjang Tahun 2016 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. laju pertumbuhan PDRB Kota Padang Panjang tahun 2016 sebesar 5,79 persen, sedangkan tahun 2015 mencapai 5,91 persen

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan peningkatan sebesar 9,93 persen. Selanjutnya lapangan usaha pendidikan juga memiliki pertumbuhan cukup tinggi yakni sebesar 8,15 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang 2012-2016



Sumber : Bappelitbang Kota Padang Panjang

Pada tahun 2016, sebagian besar lapangan usaha tumbuh di kisaran 5 -8% antara lain, lapangan usaha informasi dan komunikasi (7,85 persen), lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum (7,25 persen), lapangan usaha transportasi dan perdagangan (6,57 persen), lapangan usaha jasa perusahaan (6,24 persen), lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (6,17), lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial (5,19 persen), dan lapangan usaha konstruksi (5,19 persen).

Sementara itu lapangan usaha lainnya mampu tumbuh di bawah 5 persen. termasuk juga lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang Panjang, justru hanya mampu tumbuh sebesar 4,76 persen di tahun 2017.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

Inspektorat

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga serta urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
- 2) Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kententeraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 9) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
- 11) Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 13) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Perikanan; dan

- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

Badan Daerah Kota

Badan Daerah Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Badan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan biadang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dan selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B,
- 2) Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 29/2016
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 30/2016
3. Inspektorat Daerah diatur dengan Perwako No. 31/2016
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Perwako No. 32/2016
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 33/2016
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 34/2016
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 35/2016
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 36/2016
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 37/2016
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 38/2016
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 39/2016
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 40/2016
13. Dinas Penanaman modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 41/2016
14. Dinas Pariwisata diatur dengan Perwako No. 42/2016
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 43/2016
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 44/2016
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 45/2016
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 46/2016
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 47/2016
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 48/2016
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 49/2016

22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 49/2016
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 49/2010
24. Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No.41/2010

F. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan data SIMPEG Tahun 2017 sebanyak 2061 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 805 orang dan perempuan sebanyak 1256 orang.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2017

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	SD/Sederajat	13	1
2.	SLTP/Sederajat	34	3
3.	SLTA/Sederajat	253	187
4.	Diploma I	2	25
5.	Diploma II	10	82
6.	Diploma III	74	299
7.	Diploma IV	6	5
8.	Strata I	342	607
9.	Strata II	70	46
10.	Strata III	1	0
Total		805	1256
Total Keseluruhan		2061	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2017

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 terdiri dari 4(empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Personil Perangkat Daerah, Capaian Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang dan Permasalahan Utama, serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017; perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan tahun 2017. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target 2018 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2013 sampai tahun 2018; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERIANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 – 2018

Rencana strategis merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada. Untuk instansi pemerintah, rencana strategis tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategis tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategis. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategis tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategis tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 serta Renstra SKPD. Beberapa variabel rencana strategis yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang tahun 2017 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018. Variabel strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut **"PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA"**.

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

- 1) Padang Panjang Amanah memiliki makna pemerintah daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku;
- 2) Padang Panjang Aman memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu: Masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri;
- 3) Kehidupan yang Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang.

Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
- 3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
- 5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
- 6) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dapat

juga dikatakan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Memahami hal tersebut dan sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 beberapa tujuan yang hendak diwujudkan adalah:

Misi Pertama Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
- 2) Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN

Misi Kedua adalah Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan Islami memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- 2) Membangun Kecerdasan Islami pada Usia Dini
- 3) Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami
- 4) Mendorong perkembangan layanan perguruan tinggi
- 5) Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Industri.

Misi Ketiga yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- 3) Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan

Misi Keempat yaitu Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah bertujuan untuk:

- 1) Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa
- 2) Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global

- 3) Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

Misi Kelima yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan infrastruktur kota.
- 3) Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan.

Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- 2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga.
- 3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
- 4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Sasaran

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berikut ini digambarkan sasaran Kota Padang Panjang tersebut dan kaitannya dengan Misi dan Tujuan seperti dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Kota Padang Panjang

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang efektif dan efisien	1 Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	1. Meningkatkan Pencapaian SPM di Kota Padang Panjang
			2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria

			hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat
			3. Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi
			4. Terwujudnya penerapan Penilaian Mandiri pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan SPIP di SKPD (Indeks PMPRB dan Penerapan SPIP)
			5. Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota
			6. Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LPPD Kota
			7. Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah
			8. Penerapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	2. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang amanah dan Anti KKN	2 Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi Dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai Dengan Kebutuhan organisasi	9.Tersedianya administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Islami	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	3 Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	Meningkatnya angka melek huruf
		4 Menuntaskan program belajar 12 tahun	1. Meningkatnya APK SD/MI/SDLB/Paket A
			2. Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/Paket A
			3. Meningkatnya APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B

			4. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C
			5. Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C
			6. Menurunnya angka putus sekolah:
			a. SD
			b. SLTP
			c. SLTA
	Membangun Kecerdasan Islami pada Usia Dini	5 Membangun kecerdasan anak usia dini	Meningkatnya APK PAUD
	Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat	6 Peningkatan PHBS	1. Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru
			2. Meningkatnya persentase penjangkaran penyakit tidak menular
			3. Penyempurnaan capaian 8 tatanan kota sehat
		7 Meningkatnya status gizi masyarakat	Menurunnya persentase status gizi kurang
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dasar	8 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan
	Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B	9 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi
		10 Peningkatan mutu pelayanan	Tercapainya akreditasi RSUD sesuai dengan aturan akreditasi baru
Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah	Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah	11 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB

		12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB)
		13	Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB
		14	Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatnya nilai investasi
	Meningkatnya daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global	15	Peningkatan daya saing industri kulit	Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit
	Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi	16	Terbentuknya kawasan strategis pariwisata	Terwujudnya kawasan strategis pariwisata
		17	Mengembangkan kawasan pasar pusat	Terselenggaranya kawasan pasar pusat yang representatif
		18	Meningkatkan iklim usaha atau perdagangan yang kondusif	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen
		19	Terbentuknya kawasan pertanian terpadu	Terselenggaranya kawasan pertanian terpadu
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	20	Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10 %	Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau (RTH)
		21	Mengurangi timbulan sampah	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA
	Meningkatnya infrastruktur kota	22	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	1. Meningkatnya cakupan layanan air bersih
				2. Meningkatnya pengelolaan drainase
				3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
				4. Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas
				5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	23	Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Penurunan angka kemiskinan
				2. Penurunan angka pengangguran
				3. Persentase penurunan jumlah PMKS pertahun
	Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya	24	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	Jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ
				Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif
				Meningkatnya jumlah sanggar seni yang aktif
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	27	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1. IPG Kota Padang Panjang
				2. Meningkatnya IDG Kota Padang Panjang
	Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera	28	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang
				Menurunnya angka kelahiran
	Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera	29	Menekan angka kelahiran	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Panjang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 061/31/WAKO-PP/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 061/198/WAKO-PP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Pnjang Tahun 2013-2018

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)
2	3	4
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan Tata Laksana Pegelolaan Pemerintahan Daerah yang efektif	1. Meningkatnya pencapaian SPM kota Padang Panjang
		2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat
		3. Terwujudnya Pengelolaan Arsip berbasis teknologi informasi
		4. Terwujudnya penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan SPIP di SKPD
		5. Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP kota
		6. Meningkatnya kriteria penilaian LPPD Kota
		7. Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah
		8. Penerapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN	2. Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan mutasi yang transparan dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan organisasi	Tersedianya administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi
Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	Meningkatnya Angka melek huruf
	2. Menuntaskan program wajar 12 tahun	1. Meningkatnya APK SD/MI/SDLB/Paket A
		2. Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/ Paket A

		3. Meningkatnya APK SMP/MTsN/SMPLB/Paket B
		4. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
		5. Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C
		6. Menurunnya angka putus sekolah : a. SD b. SLTP c. SLTA
Membangun kecerdasan anak usia dini	3. Membangun Kecerdasan anak usia dini	Meningkatnya APK PAUD
Peningkatan Pelayanan Berbasis	1. Peningkatan PHBS	1. Meningkatnya tingkat kesembuhan Penyakit menular TB Paru
		2. Meningkatnya persentase penjangkaran penyakit tidak menular
		3. Penyempurnaan capaian 8 tatanan kota sehat
Peningkatan Kualitas pelayanan dasar	2. Meningkatkan status gizi masyarakat	Menurunnya persentase status gizi kurang
	3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pelayanan dasar	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan
Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B	4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi
	5. Peningkatan mutu pelayanan	Tercapainya Akreditasi RSUD sesuai dengan aturan akreditasi baru
Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB
	2. Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB)
	3. Meningkatnya PDRB sektor tersier	Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB

	4. Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi
Meningkatnya daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global	5. Peningkatan daya saing industri kulit	Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit
Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi	6. Terbentuknya kawasan strategis pariwisata	Terbentuknya kawasan strategis pariwisata
	7. Mengembangkan kawasan pasar pusat	Terselenggaranya kawasan pasar pusat yang representatif
	8. Meningkatkan iklim usaha/perdagangan yang kondusif	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen
	9. Terbentuknya kawasan pertanian terpadu	Terselenggaranya kawasan pertanian terpadu
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Terpeliharanya Proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10%	Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau
	2. Mengurangi timbulan sampah	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA
Meningkatnya infrastruktur kota	3. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	1. Meningkatnya cakupan layanan air bersih
		2. Meningkatnya pengelolaan drainase
		3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
		4. Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas
		5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Penurunan angka kemiskinan
		2. Penurunan angka pengangguran
		3. Persentase penurunan jumlah PKMS pertahun

Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya	2. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	Jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ
	3. Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya cabang olahraga yang aktif
	4. Meningkatnya Kegiatan seni dan budaya	Meningkatnya jumlah sanggar seni yang aktif
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1. IPG Kota Padang Panjang
		2. Meningkatnya IDG Kota Padang Panjang
	6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang
Kepedulian masyarakat mewujudkan	7. Menekan angka kelahiran	Menurunnya Angka kelahiran

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	1. Meningkatkan Pencapaian SPM Di Kota Padang Panjang	85%
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
		3. Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi	15%
		4. Terwujudnya penerapan Penilaian Mandiri pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan SPIP di SKPD (Indeks PMPRB dan Penerapan SPIP)	40%
		5. Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota	CC
		6. Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LPPD Kota	Tinggi
		7. Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
		8. Penerapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	94%
2.	Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi Dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai Dengan Kebutuhan organisasi	Tersedianya administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi	73% (SAPK, CAT pada Penerimaan CPNS, Ujian Dinas, Ujian Pindah)
3.	Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	Meningkatnya angka melek huruf	99,46%
4.	Menuntaskan program belajar 12 tahun	1. Meningkatnya APK SD/MI/SDLB/Paket A	119,50%

		2. Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/Paket A	109,42%
		3. Meningkatnya APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	132,54%
		4. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	237,44%
		5. Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	161,64%
		6. Menurunnya angka putus sekolah:	
		a. SD	0,16%
		b. SLTP	0,13%
		c. SLTA	0,51%
5.	Membangun kecerdasan anak usia dini	Meningkatnya APK PAUD	88,45%
6.	Peningkatan PHBS	1. Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru	80,80%
		2. Meningkatnya persentase penjarangan penyakit tidak menular	35,00%
		3. Penyempurnaan capaian 8 tatanan kota sehat	8 tatanan
7.	Meningkatnya status gizi masyarakat	Menurunnya persentase status gizi kurang	5,16%
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan	76%
9.	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi	49%
10.	Peningkatan mutu pelayanan	Tercapainya akreditasi RSUD sesuai dengan aturan akreditasi baru	Tahap Penilaian
11.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	6,69%
12.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB)	36.929.991
13.	Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	73,26%
14.	Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatnya nilai investasi	615 Milyar

15.	Peningkatan daya saing industri kulit	Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit	15 Ton/Tahun
16.	Terbentuknya kawasan strategis pariwisata	Terwujudnya kawasan strategis pariwisata	80%
17.	Mengembangkan kawasan pasar pusat	Terselenggaranya kawasan pasar pusat yang representatif	100%
18.	Meningkatkan iklim usaha atau perdagangan yang kondusif	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	100%
19.	Terbentuknya kawasan pertanian terpadu	Terselenggaranya kawasan pertanian terpadu	85% (Pengelolaan kawasan pertanian terpadu tahun 1)
20.	Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10 %	Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau (RTH)	7%
21.	Mengurangi timbulan sampah	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA	77%
22.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	1. Meningkatnya cakupan layanan air bersih	94,4
		2. Meningkatnya pengelolaan drainase	87,86%
		3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	62,00%
		4. Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas	56,00%
		5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum	58,00%
23	Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Penurunan angka kemiskinan	5,70%
		2. Penurunan angka pengangguran	
		3. Persentase penurunan jumlah PMKS pertahun	4,8
24	peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ	3 Milyar

25	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif	15 Cabang
26	Meningkatnya kegiatan seni dan budaya	Meningkatnya jumlah sanggar seni yang aktif	22 Unit
27	meningkatkan pemberdayaan perempuan	1. IPG kota padang panjang	79,55%
		2. Meningkatkan IDG kota padang panjang	80,01%
28	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang	98,54%
29	Menekan angka kelahiran	Menurunnya angka kelahiran	1,86%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta telah berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah, guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII c dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91	Sangat tinggi
2.	76 > 90	Tinggi
3.	66 > 75	Sedang
4.	51 > 65	Rendah
5.	50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010

Adapun tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan tata laksana pengelolaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya pencapaian SPM di Kota Padang Panjang	85%	84,59%	99,51%
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah berdasarkan kriteria hasil survei indeks kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik
	Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi	15%	40,38%	269,2%
	Terwujudnya penerapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dan SPIP di SKPD			
	Indeks PMPRB	54,94	54,94	100%
	Penerapan SPIP	45,83	45,83	100%
	Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LKjIP Kota	CC	CC	100%
	Meningkatnya kriteria penilaian LPPD Kota	Tinggi (2,93)	-	-

	Dipertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	-	-
	Penerapan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	94%	100	106,38
Mengembangkan sistem rekrutmen, promosi dan mutasi yang transparan dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan organisasi	Tersedianya administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi	73% (SPAK, CAT pada penerimaan CPNS)	54,75%	75%
Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	Meningkatnya angka melek huruf	99,46%	99,46%	100%
Menuntaskan program belajar 12 tahun	Meningkatnya APK SD/MI/SDLB/Paket A	119,50%	117,44%	98,30%
	Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/Paket A	109,42%	120,79%	110,39%
	Meningkatnya APK SMP/MTSN/SMP LB/Paket B	132,54%	154,87%	116,87%
	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/S MALB/Paket C	237,44%	229,34%	96,58%
	Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/S MALB/Paket C	161,64%	184,50%	114,14%
	Menurunnya angka putus sekolah			
	SD	0,16%	0,07%	156,25%

	SLTP	0,13%	0,19%	53,85%
	SLTA	0,51%	0,76%	50,98%
Membangun kecerdasan anak usia dini	Meningkatnya APK PAUD	88,45%	89,26%	100,91%
Peningkatan PHBS	Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru	80,80%	91,06%	112,70%
	Meningkatnya persentase penjangkaran penyakit tidak menular	35,00%	32%	91,42%
	Penyempurnaan pencapaian 8 tatanan kota sehat	8 tatanan	8 tatanan	-
Meningkatkan status gizi masyarakat	Menurunya persentase status gizi kurang	5,16%	5,76%	88,37%
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang Memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan	76%	80%	105,26%
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi	49%	91,05%	185,82%
Peningkatan mutu pelayanan	Tercapainya akreditasi RSUD sesuai dengan aturan akreditasi baru	Tahap penilaian	Terakreditasi dengan nilai paripurna	-
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	6,69%	5,8%	86,69%

Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB)	36.929.991	57.990.000, -	157,02
Meningkatnya PDRB sektor tersier	Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	73,26%	75,6*%	103,19%
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi	615 milyar	750,20 milyar	121,98%
Peningkatan daya saing industri kulit	Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit	92 ton/tahun	16,5 ton/tahun	17,93%
Terbentuknya kawasan strategis pariwisata	Terwujudnya kawasan strategis pariwisata	80%	50%	70,59%
Mengembangkan kawasan pasar pusat	Terselenggaranya kawasan pasar pusat yang representatif	100%	75%	75%
Meningkatnya iklim usaha/perdagangan yang kondusif	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	100%	100%	100%
Terbentuknya kawasan pertanian terpadu	Terselenggaranya kawasan pertanian terpadu	85%	60	70,59
Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10%	Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau	7%	6,97%	99,57%
Mengurangi timbulan sampah	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA	77%	76,99%	99,99%

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	Meningkatnya cakupan layanan air bersih	94,4%	93,14%	98,66%
	Meningkatnya pengelolaan drainase	87,86%	90,92%	103,48%
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	62,00%	100%	161,3%
	Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas	56,00%	76,81%	137,16%
	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum	58,00%	94,32%	162,62%
Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat	Penurunan angka kemiskinan	5,70%	6,32%	89,12%
	Penurunan angka pengangguran	4,40%	5,70%	70,45%
	Persentase penurunan jumlah PMKS pertahun	4,8%	2,94%	138,75%
Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	Jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan	3 milyar rupiah	3.086.467.261,- milyar rupiah	102,88%
Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya cabang olahraga yang aktif	15 cabang	17 cabang	113,33%
Meningkatnya kegiatan seni dan budaya	Meningkatnya jumlah sanggar seni yang aktif	22 unit	24 unit	109,09%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	IPG Kota Padang Panjang	79,55%	79,55%	100%

	Meningkatnya IDG Kota Padang Panjang	80,01%	80,01%	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang	98,54%	98,54%	100%
Menekan angka kelahiran	Menurunnya angka kelahiran	1,86%	0,37%	180,11%

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja dalam lampiran I.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2017 yang merupakan tahun keempat RPJMD 2013-2018, Pemerintah Kota Padang Panjang secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis dan 51 (lima puluh satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun perjanjian kinerja tahun 2017 Pemerintah Kota Padang Panjang.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 29 (dua puluh sembilan) sasaran strategis Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yaitu “Memantapkan Tata Cara Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN”, dan juga untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien”. Untuk mengukur sasaran strategis 1 ini terdapat 9 indikator sasaran.

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016			2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya pencapaian SPM di Kota Padang Panjang (%)	70	98.31	140	85	84.59	99.51	100	98,31%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey indeks kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Sangat Baik	Baik
3	Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi (%)	10	28.85	288.5	15	40.38	269.2	20	201.9
4	Terwujudnya penerapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dan SPIP di SKPD (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Persentase Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	-	-	-	100	54.94	54.94	100	54.94
b	Persentase Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah di SKPD	-	-	-	100	45.83	45.83	100	45.83

5	Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LKjIP kota	100			CC	CC	-	B	-
6	Meningkatnya kriteria penilaian LPPD kota	102,09			2.93	Nilai EKPPD belum keluar		Sangat Tinggi (3.01)	-
7	Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah	75			WTP	WTP	-	WTP	
8	Penerapan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (%)		-		94	100	106.38	100	100

Sumber Data : Setdako, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Inspektorat, BPKD, Bappelitbang Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 9 indikator sasaran Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien 2 indikator sasaran melebihi target, 3 indikator mencapai target dan 2 indikator sasaran tidak mencapai target dan 2 indikator yang belum terealisasi karena nilainya belum dapat dirilis. Pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. **Meningkatnya pencapaian SPM di Kota Padang Panjang**

Pencapaian realisasi SPM di Kota Padang Panjang Tahun 2017 mencapai 84.59 % dari target 85 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 99.51 % dengan kriteria tinggi. Dibanding tahun 2016, pencapaian SPM di Kota Padang Panjang mengalami penurunan capaian target karena tahun 2017 terdapat perubahan dalam Bidang Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menetapkan 6 (enam) jenis pelayanan dasar yaitu :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan

- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 6) Sosial

Tabel 3.4

Jenis SPM dan OPD Penanggung Jawab serta Pencapaian Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	Jenis SPM	OPD Penanggung Jawab	Pencapaian 2016	Pencapaian 2017
1	SPM bidang Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	50,69	55
2	SPM bidang Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup	63,14	88.66
3	SPM bidang Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	18,93	-
4	SPM bidang Sosial		11,05	59.61
5	SPM bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	71,41	73.58
6	SPM bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	98,80	97.68
7	SPM bidang Kesenian	Dinas Porbudpar	337.62	-
8	SPM bidang Kominfo	Dinas Perhubungan kominfo	279.72	-
9	SPM bidang Perhubungan		57.58	-
10	SPM bidang Penanaman Modal	BAPPEDA	45.46	-
11	SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	101.94	
12	SPM bidang Keluarga Berencana		74.29	
13	SPM bidang Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	94.65	
14	SPM bidang Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	86.69	
15	SPM Pemerintahan Dalam Negeri	Sekretariat Daerah, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Capil	82.59	-
16	SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP dan Damkar	-	133
	<i>Rata-rata Pencapaian SPM</i>		98.30	84.59

Sumber Data : Bagian Organisasi Setdako Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Apabila dilihat dari tabel diatas, penurunan kinerja indikator ini disebabkan penurunan realisasi dari SPM Bidang Pendidikan. Apabila dibandingkan dengan capaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2016 sebesar 98.80 % mengalami penurunan dengan tahun 2017 sebesar 97.68 % Hal ini disebabkan 1 indikator SPM Bidang Pendidikan yaitu : Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 36 orang tidak tercapai. Terdapat 2 SMP yang rombongan belajar melebihi 36 orang yaitu SMP 1 dan SMP 2 Padang Panjang. Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang diharapkan dapat memberikan solusi agar pencapaian indikator pada SPM ini bisa ditingkatkan.

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Salah satu capaian kinerja instansi dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat di Kota Padang Panjang telah dilakukan semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, pelaksanaan survey secara umum dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, namun secara khusus setiap unit pelayanan tetap melakukan survey secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil Survey yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 memperoleh gambaran bahwa dari 12 unit pelayanan yang disurvei 8 unit diantaranya memperoleh nilai baik dan 4 unit memperoleh nilai kurang baik sehingga capaian tahun 2017 rata-rata mencapai nilai interval sebesar 77.64. Dan nilai interval IKM sebesar 77.64 dengan Predikat Baik(dalam interval nilai 76.66-88.30) dengan perincian nilai dan predikat mutu pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.5: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan Kota Padang Panjang

No.	Unit Pelayanan	Nilai Interval	Nilai interval konversi IKM	Nilai interval IKM	Kinerja	Mutu pelayanan
1	Kelurahan Pasar Usang	3,21	76.61-88.30	80.15	Baik	B

2	Kelurahan Silaing Atas	2.95	65.00-76.60	73.65	Kurang Baik	C
3	Kelurahan Guguk Malintang	3.12	76.61-88.30	78.10	Baik	B
4	Kelurahan Koto Katiak	2.78	65.00-76.00	69.60	Kurang Baik	C
5	Kelurahan Tanah Pak Lambik	2.81	65.00-76.00	70.15	Kurang Baik	C
6	Kelurahan Ekor Lubuk	3.08	76.61-88.30	77.03	Baik	B
7	Kelurahan Balai-Balai	2.98	65.00-76.00	74.53	Kurang Baik	C
8	Kelurahan Bukit Surungan	3.19	76.61-88.30	79.78	Baik	B
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.35	76.61-88.30	83.78	Baik	B
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.26	76.61-88.30	81.33	Baik	B
11	UPTD Puskesmas Gunung	3.32	76.61-88.30	83	Baik	B
12	UPTD Puskesmas Bukit Surungan	3.20	76.61-88.30	80.63	Baik	B
	Nilai Rata-Rata			77.64	Baik	

Sumber : *Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang tahun 2017, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat*

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- Peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan keprofesionalan aparatur pemerintah;
- Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik
- Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan SPP
- Pelayanan tidak berbelit-belit

3. Terwujudnya Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi

Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, melalui kegiatan pengumpulan data dan penyimpanan arsip dalam bentuk data scan yang dipindahkan secara elektronik atau dilakukan dengan digital copy menggunakan resolusi tinggi. Dari 52 Box arsip statis yang tersedia pada Dinas Perpustakaan dan Arsip telah dipindahkan 21 Box secara digital sebanyak 21 Box arsip. Hasil dari digital copy tersebut disimpan dalam hard drive atau *optical disk* sebagai perangkat kerasnya (hardware) yang terdiri dari seperangkat komputer, printer, dot matrix printer, scanner, UPS (*Uninterruptible power supply*) reader/scanner. Untuk operasionalnya didukung dengan perangkat lunak (*software*) dalam bentuk sebuah sistem aplikasi yang bertujuan untuk menjamin keberadaan, pemeliharaan dan ketersediaan arsip agar diperoleh kemudahan dalam penemuan kembali arsip.

Atas capaian indikator kinerja terwujudnya pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi ini pada tahun 2017 termasuk dalam kategori sangat baik, karena dari target kinerja 15% terealisasi 40.38 % atau capaian kinerja adalah sebesar 269.2 %.

Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi berdampak duplikasi dan peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data informasi yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Padang Panjang dan informasi tentang Sejarah dan Budaya Padang Panjang secara keseluruhan.

4. Terwujudnya Penerapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dan SPIP di SKPD

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB), PMPRB dilakukan oleh masing-masing SKPD kemudian dikoordinir oleh Inspektorat untuk dilaporkan ke pusat. Sehingga pada RPJMD Kota Padang Panjang ditargetkan 20% dari OPD yang ada harus menerapkan PMPRB. Pada tahun 2017 ini ditargetkan 24 OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, terjadi perubahan kebijakan dimana PMPRB dilaksanakan oleh tim yang

dikoordinir oleh inspektur dengan menggunakan indikator yang berbeda dengan peraturan sebelumnya.

Tabel 3.6
Capaian Hasil Indeks PMPRB

Tahun	Indeks PMPRB
2015	45,95%
2016	45,22%
2017	54,94%

Sumber : Inspektorat Setdako Padang Panjang tahun 2017

Pada tahun 2017 melalui tim pengumpulan data ke 24 OPD yang terdapat di Kota Padang Panjang dengan hasil indeks PMPRB 54,94%. Dengan demikian jika dibandingkan tahun 2016 dengan hasil indeks sebesar 45,22% sudah ada peningkatan walaupun masih terdapat berbagai kelemahan dimasing-masing SKPD.

b. SPIP

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penambahan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari 5 unsur yakni:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian resiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern

Sejak tahun 2015 hingga 2017, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan penilaian resiko secara bertahap, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Penerapan SPIP

Tahun	Target SKPD menyusun penilaian resiko	Tersusun draf penilaian resiko	Tersusun penilaian resiko
2015	7 SKPD	-	7 SKPD
2016	27 SKPD	-	9 SKPD
2017	24 OPD	-	Konfirmasi Dari Inspektorat 11 OPD

Sumber : Inspektorat Setdako Padang Panjang tahun 2017

Pada tahun 2017, dari 24 OPD dilingkungan Pemerintah kota Padang Panjang, hanya 11 OPD yang melaporkan RTP. Hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman OPD dalam pengimplementasian SPIP dalam setiap kegiatan masing-masing. Namun demikian karena implementasi SPIP dan PMPRB satu kesatuan indikator pada dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja, maka terhadap indikator ini juga belum bisa dilakukan pengukuran berdasarkan definisi operasional yang ada. Untuk itu kedepan, akan dilaksanakan penyesuaian terhadap indikator “ Terwujudnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan SPIP pada OPD” dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja.

5. Meningkatnya Kriteria Penilaian Evaluasi LKjIP Kota.

Hasil evaluasi LKjIP merupakan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Komponen penilaian evaluasi LKjIP meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, capaian indikator kriteria penilaian evaluasi LKjIP Kota Padang Panjang tahun ini memperoleh kategori yang sama dengan capaian tahun 2016. Jika dikaitkan dengan target RPjMD masih diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras semua pihak sehingga target RPjMD 2013-2018 dapat dicapai, yaitu Kota Padang Panjang ditargetkan mendapat kategori B (baik), adapun komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8

Komponen Penilaian LKjIP

No	Indikator Yang Dinilai	Realisasi 2015		Realisasi 2016		Realisasi 2017	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	19,77	35	19,52	30	21.04
2	Pengukuran Kerja	25	8,39	20	9,86	25	10.68
3	Pelaporan Kinerja	15	9,74	15	9,65	15	7.88
4	Evaluasi Internal	10	5,32	10	5,89	10	5.88
5	Capaian Kinerja	20	9,42	20	10,21	20	8.69
Nilai Evaluasi		100	52,64	100	55,13	100	54.17
Tingkat Angkutabilitas Kinerja			CC		CC		CC

Sumber : LHE-SAKIP 2017

6. **Meningkatnya Kriteria Penilaian LPPD Kota.**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan LPPD kepada Pemerintah. LPPD digunakan sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada pemerintah paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tingkat regional (propinsi) dan di tingkat pusat. Hasil evaluasi kinerja dengan menggunakan sistem EKPPD adalah berupa indeks dengan rentang 0-4. Dimana skor $0,00 < 1,00$ dikategorikan sebagai 'rendah', $1,00 < 2,00$ dikategorikan sebagai 'Sedang', $2,00 < 3,00$ dikategorikan sebagai 'Tinggi', $3,00 < 4,00$ dikategorikan sebagai 'Sangat Tinggi'. Untuk EKPPD 2017 yang merupakan evaluasi atas LPPD TA 2016, Kota Padang Panjang mendapatkan nilai yakni 2,9289 (kategori tinggi) dari target RPJMD pada tahun 2017. Sedangkan untuk EKPPD 2018, yang merupakan evaluasi atas LPPD

Tahun Anggaran 2017 hasil penilaian akan diperoleh pada Bulan Juni 2018, sehingga hasilnya belum dapat ditampilkan.

7. Dipertahankannya Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan:

- 1) Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 2) Kecukupan Pengungkapan
- 3) Efektifitas sistem pengendalian intern, dan
- 4) Kepatuhan terhadap perundang undangan.

Untuk audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan untuk nilai audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2016 yang dilakukan pada Tahun 2017 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian**. Hasil ini sesuai dengan target kinerja yang diharapkan pada target 2016. Target akhir RPjMD Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan.

8. Penerapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan setiap implementasinya dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Setiap Tahunnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan penilaian atas penerapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Pada Tahun 2015 nilai yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri RI terhadap penerapan Inpres Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Padang Panjang realisasinya mencapai 100% dari target 94% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 109,37% dengan kriteria sangat tinggi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Sasaran Ini :

1. Adanya peraturan perundang undangan yang mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam hal penyusunan surat dokumen pelaporan daerah
2. Komitmen kepala daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah
3. Dukungan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan data laporan daerah.

Hambatan/ Masalah :

1. Hasil Evaluasi Laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam perencanaan pembangunan ditahun berikutnya;
2. Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan daerah sehingga dalam memproses atau menginput data terkadang masih lamban;
3. BPK dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir belum dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan;
4. Peran aktif SKPD terkait dalam mewujudkan pelaksanaan SPIP dan PMPRB.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendampingan baik dalam memberikan pemahaman tentang sistem manajemen akuntabilitas kepada pimpinan OPD atau unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan. Untuk penyusunan Laporan Kinerja, pendampingan dilaksanakan dengan nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sedangkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

SASARAN STRATEGIS 2

Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.

Untuk mewujudkan Visi Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera perlu didukung oleh sistem rekrutmen, promosi dan mutasi yang transparan dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jika tidak demikian maka akan muncul persoalan-persoalan seperti ketidaksesuaian antara kompetensi aparatur dengan jabatan yang diemban atau tidak sesuai dengan konsep the right man on the right place. Jika hal ini terjadi akan menyebabkan rendahnya kinerja dan produktivitas PNS. Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Sasaran kedua yaitu Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi. Hasil evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 75 % dengan kriteria tinggi.

Tabel 3.9
Pencapaian Sasaran Strategis 2
Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Yang Berbasis Teknologi (%)	59	52	88.13	73	54.75	75	80	68.44

Sumber : BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator ini pada tahun 2017 tidak mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 75% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 88.13 %. Belum tercapainya realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2017 dikarenakan belum dialokasikan anggaran pelaksanaan sistem CAT untuk ujian pindah PNS dan tidak adanya penerimaan CPNS pada tahun 2017 karena pemberlakuan moratorium CPNS oleh Pemerintah Pusat. Sistem CAT baru dilaksanakan pada pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah. Solusi untuk meningkatkan realisasi target dari indikator ini adalah menganggarkan dan melaksanakan sistem CAT pada Ujian Pindah PNS serta pada pelaksanaan penerimaan CPNS sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dalam hal administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menerapkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) *on line*. Aplikasi ini bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian secara transparan dan objektif sehingga konsep *the right man on the right place* bisa terlaksana dengan baik.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatkan Angka Melek Huruf pada Usia 7 Tahun Keatas

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warganegara maupun kontribusi pendidikan terhadap tujuan pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Mengingat pentingnya penuntasan buta aksara, maka Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Angka Melek Huruf pada Usia 7 Tahun Keatas dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja

sasaran sebesar 100 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Angka Melek Huruf pada Usia 7 Tahun Keatas

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Angka Melek Huruf (%)	99.42	99.46	100.04	99.46	99.46	100	99.50	99.96

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatkan Angka Melek Huruf pada usia 7 tahun ke atas Belajar 12 Tahun telah mencapai target. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatkan Angka Melek Huruf pada tahun 2017 sebesar 100 %. Pada tahun 2017 tidak dilakukan pendataan untuk indikator ini, sehingga data yang digunakan adalah data tahun sebelumnya. Angka Melek Huruf di Kota Padang Panjang pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan angka melek huruf di Propinsi Sumatera Barat sebesar 97.52 %. Untuk Meningkatkan Angka Melek Huruf di Kota Padang Panjang berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan seperti Program Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional.

SASARAN STRATEGIS 4

Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan Pembangunan Nasional. Kemajuan suatu daerah dapat dinilai dari bagaimana penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan terhadap rakyat didaerahnya yang lebih maju, tingkat pendidikannya relatif lebih baik dibanding daerah yang masih berkembang. Program Wajib Belajar 12 Tahun memberikan isyarat pada

seluruh masyarakat Kota Padang Panjang diwajibkan menyelesaikan pendidikan minimal berijazah SLTA Sederajat.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran terdiri dari; Indikator Meningkatnya APK SD/MI/SDLB/Paket A menunjukkan capaian kinerja sebesar 98.30 % dengan kriteria sangat tinggi ; Indikator Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/Paket A menunjukkan capaian kinerja sebesar 110.39 % dengan kriteria sangat tinggi; Indikator Meningkatnya APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B menunjukkan capaian kinerja sebesar 116.87 % dengan kriteria sangat tinggi; Indikator Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C menunjukkan capaian kinerja sebesar 96.58 % dengan kriteria sangat tinggi ; Indikator Menurunnya Angka Putus Sekolah SD dengan kriteria menunjukkan capaian kinerja sebesar 156.25 % dengan kriteria sangat tinggi; Indikator menurunnya Angka Putus Sekolah SLTP menunjukkan capaian kinerja sebesar 53.85 % dengan kriteria sedang ; Indikator Menurunnya Angka Putus Sekolah SLTA menunjukkan capaian kinerja sebesar 50.98 % dengan kriteria sedang Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Pencapaian Sasaran Strategis 4
Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya APK SD/MI/SDLB/Paket A (%)	119	119.14	100.11	119.50	117.44	98.30	120	97.86
Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/Paket A (%)	108.85	108.40	99.59	109.42	120.79	110.39	110	109.81
Meningkatnya APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	132.09	188.65	142.81	132.54	154.87	116.87	133	114.71

Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/SM ALB Paket C (%)	236.89	210.25	88.75	237.44	229.34	96.41	238	96.36
Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/SM ALB Paket C (%)	161.29	148.41	92.01	161.64	184.50	114.14	162	113.88
Menurunnya Angka Putus Sekolah : (%)								
SD	0.22	0.07	168.18**)	0.16	0.07	156.25	0.1	70
SLTP	0.16	0.08	150 **)	0.13	0.19	53.85	0.1	190
SLTA	0.62	0.29	153.22**)	0.51	0.76	50.98	0.4	190

Sumber Data Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun belum mencapai target, 3 indikator sasaran telah mencapai target. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya APK SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2017 sebesar 98.30 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100.11%. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2017 sebesar 110.39 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 99.59 %. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2017 sebesar 116.85 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 142.81 %. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2017 sebesar 96.85 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 88.75 %. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C pada tahun 2017 sebesar 114.14 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 92.01 %. Capaian kinerja untuk Indikator Menurunnya Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2017 sebesar 156.25 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 168.16 %. Capaian kinerja untuk Indikator Menurunnya Angka Putus

Sekolah SLTP pada tahun 2017 sebesar 53.85 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 150 %. %. Capaian kinerja untuk Indikator Menurunnya Angka Putus Sekolah SLTA pada tahun 2017 sebesar 50.98 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 153.22 %.

- Tidak tercapainya target APK SD/MI/SDLB/Paket A dikarenakan anak usia sekolah 7 s.d 12 tahun untuk tahun ajaran 2017/2018 mendekati kepada aturan usia masuk sekolah 7 tahun sehingga hal ini menyebabkan APK SD/MI/SDLB/Paket A mengalami penurunan dan angka capaian APM SD/MI/SDLB/Paket A dengan sendirinya mengalami peningkatan.
- Hal tersebut berlaku sama pada APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C, disamping itu dengan keluarnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengelolaan SMA dan SMK menjadi kewenangan Propinsi, sehingga hal tersebut mempengaruhi kewenangan pengaturan penerimaan siswa baru.
- Sehubungan dengan angka putus sekolah berada pada satuan pendidikan formal, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang memberikan pendekatan persuasif kepada siswa dan orang tua yang bersangkutan untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah formal dan disamping itu dihimbau kepada siswa yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A, B dan C).

SASARAN STRATEGIS 5

Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan prilaku serta agama), bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan

yang dilalui oleh anak usia dini. Begitu pentingnya pendidikan ini. Pemerintah kota Padang Panjang menjadikan pembangunan kecerdasan Anak Usia Dini menjadi sasaran Prioritas dalam RPJMD 3013-2018.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini dengan 1 indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 109.92 dengan kriteria sangat tinggi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Pencapaian Sasaran Strategis 5
Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya APK PAUD (%)	88.45	101.25	114.47	88.45	89.26	100.91	95	93.96

Sumber Data Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini telah mencapai melebihi target. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya APK PAUD pada tahun 2017 sebesar 100.91% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 114.47 %. Penurunan capaian kinerja pada sasaran ini disebabkan karena perbedaan metode penghitungan yang digunakan.

- Jumlah peserta didik PAUD di Kota Padang Panjang adalah sebanyak 6.519 orang yang tersebar pada Kelompok Taman Kanak-Kanak sebanyak 1.407 orang, Kelompok Bermain sebanyak 846 orang, Tempat Penitipan Anak 351 orang dan Kelompok Satuan PAUD Sejenis sebanyak 3.916 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia 0 s.d 6 tahun sebanyak 7.303 orang.
- Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target APK PAUD Tahun 2017 adalah:
 1. Kegiatan Sosialisasi dan Promosi PAUD oleh kader pada kegiatan Posyandu.

2. Adanya persyaratan minimal jumlah anak pada lembaga PAUD Baru sebanyak 20 orang peserta didik.
3. Pemberian insentif bagi Guru PAUD berdasarkan rasio anak dan guru yang telah diatur dalam Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Usia lahir < 2 tahun: rasio guru anak dan anak 1 : 4
 - b. Usia lahir 2 s.d 4 tahun: rasio guru dan anak 1 : 8
 - c. Usia lahir 4 s.d 6 tahun: rasio guru dan anak 1 : 15
4. Pemberian Bantuan Operasional PAUD berdasarkan jumlah anak (Rp. 600.000,-/anak). Semakin banyak jumlah anak semakin besar BOP yang diterima lembaga PAUD. Lembaga PAUD melakukan promosi melalui radio, brosur, spanduk ataupun menyelenggarakan lomba-lomba.

SASARAN STRATEGIS 6

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) merupakan salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut. Pada Tahun 2017 PHBS telah menjadi sasaran Kota Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran masing sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Pencapaian Sasaran Strategis 6
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya tingkat kesembuhan	76.6	68.2	89.03	80.80	91.06	112.70	85	107.12

penyakit menular TB Paru (%)								
Meningkatnya persentase penjaringan kasus baru penyakit tidak menular (PTM) (%)	30	22	73.33	35	32	91.42	40	80
Meningkatnya capaian jumlah tatanan Kota Sehat (tatanan)	8	8	-	8	8	-	8	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, 1 indikator sasaran mencapai melebihi target, 1 indikator sasaran mencapai target dan 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya Tingkat Kesembuhan Penyakit Menular TB Paru pada tahun 2017 sebesar 112.70 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 89.03 %. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya Persentase Penjaringan Kasus Baru Penyakit Tidak Menular pada tahun 2017 sebesar 91.42 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 73.33 %. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya Capaian Jumlah Tatanan Kota Sehat pada tahun 2017 sebanyak 8 tatanan sama dengan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebanyak 8 tatanan.

- Tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru tahun 2017 mencapai 91.06 %, dari target yang ditetapkan sebesar 80.80 % . Jumlah pasien TB keseluruhan Tahun 2017 sebanyak 123 orang, sedangkan pasien yang sembuh sebanyak 112 orang. Bagi pasien yang belum sembuh dengan alasan drop out, gagal pengobatan dan lalai dalam pengobatan maka Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melakukan antara lain : melacak identitas pasien yang drop out dan mengembalikan pasien yang drop out ke puskesmas terdekat dimana pasien berdomisili.
- Faktor yang mendukung pencapaian tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru adalah:

- a. Memberikan sosialisasi kepada penderita TB Paru tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b. Tersedianya obat yang cukup dan kontiniu dan kesadaran penderita meminum obat tepat waktu dan teratur dengan didampingi Pengawas Minum Obat (PMO).
 - c. Tingginya dedikasi tenaga kesehatan dalam melaksanakan penjangkauan pasien TB.
 - d. Kesadaran masyarakat dalam memeriksakan diri apabila batuk berdahak lebih dari dua minggu.
- Tercapainya target untuk indikator Capaian Jumlah Tatanan Kota Sehat sesuai 8 tatanan tidak terlepas dari koordinasi Pemerintah Kota Padang Panjang, Forum Kota Sehat dan masyarakat dalam mewujudkan tatanan tersebut. Keberhasilan ini dapat dilihat dengan diperolehnya penghargaan tertinggi dalam penyelenggara Kota Sehat pada tahun 2017 yaitu “Swasti Saba Bistara.
 - Indikator Meningkatnya Persentase Penjangkauan Kasus Baru Penyakit Tidak Menular belum mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 32 % dengan capaian kinerja sebesar 91.42 %.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya persentase penjangkauan kasus baru penyakit tidak menular (PTM) adalah sebagai berikut :

- a. Belum semua masyarakat mau untuk melakukan deteksi dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular baik ke fasilitas kesehatan maupun ke posbindu PTM.
- b. Pelaksanaan Posbindu PTM yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga menjadi hambatan bagi masyarakat yang bekerja.
- c. Pelayanan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular belum seluruhnya menjangkau usia sekolah dan remaja pada usia 15-22 tahun.

Solusi :

- a. Meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media baik melalui penyuluhan langsung maupun tidak langsung tentang pentingnya mengenal Faktor Resiko PTM.

- b. Meningkatkan jangkauan penjangkauan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular ke kantor dan tempat kerja secara berkala melalui kegiatan posbindu perkantoran.
- c. Meningkatkan jangkauan penjangkauan faktor Resiko Penyakit Tidak Menular ke sekolah secara berkala dengan mengintegrasikan Program dengan kegiatan UKS.
- d. Meningkatkan pembiayaan dalam pengadaan sarana dan prasarana bahan pemeriksaan PTM (gula darah, kolesterol, asam urat).

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

Salah satu wujud keberhasilan bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat. Keberhasilan tersebut salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya status gizi masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang selalu berupaya dalam peningkatan status gizi masyarakat dengan melaksanakan perbaikan gizi masyarakat, serta melaksanakan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 91.72 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Menurunnya persentase status gizi kurang (%)	5.32	5.82	90.60**)	5.16	5.76	88,37	5	84,88

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat tidak mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 88,37 % mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 90.60 %.

- Masih belum tercapainya target indikator sasaran ini dikarenakan masih ditemuinya beberapa persoalan sebagai berikut :
 1. Masih rendahnya kepedulian ibu balita terhadap manfaat posyandu sebagai wadah tempat pemantauan pertumbuhan balita.
 2. Masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu terhadap pola asuh khususnya pola makan balita (terutama kurangnya konsumsi protein alami)
 3. Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor dalam peningkatan kunjungan ke posyandu.
 4. Tempat tinggal masyarakat yang sering berpindah pindah, sehingga tidak terjangkau secara optimal oleh tenaga kesehatan.

Solusi

1. Mengoptimalkan Pokjanel Posyandu mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
2. Mengintensifkan Promosi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas petugas dan kader kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan secara umum.
4. Advokasi dengan lintas sektor untuk pembentukan pos gizi di setiap kecamatan

SASARAN STRATEGIS 8

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan program-program peningkatan sarana dan prasarana akan tetapi juga harus ditunjang dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan harus memenuhi syarat dan memiliki sertifikat kompetensi

yang sesuai dengan penempatannya. Untuk mewujudkan hal tersebut disamping menempatkan Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan keahliannya juga harus ditunjang dengan peningkatan keahliannya.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Pencapaian Sasaran Strategis 8
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan (%)	72	80	111.11	76	80	105,26	80	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Dasar mencapai target. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 105,26 %, mengalami penurunan jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2016 yang mencapai sebesar 111.11 %.

- Kompetensi SDM Tenaga Pelayanan Dasar sangat menentukan karena merupakan kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal yang sesuai dengan standar pelayanan medis.Tenaga Kesehatan Pelayanan Dasar berprinsip pada pelayanan paripurna, menyeluruh dan berorientasi kepada masyarakat dan komunitas yang

akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu mereka harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan peraturan berlaku.

- Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tahun 2017, Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi sebagai dokumen bahwa tenaga kesehatan bersangkutan telah mempunyai Sertifikat Kompetensi adalah sebanyak 10 orang Dokter Umum, 4 orang Dokter Gigi, 42 orang Perawat, 8 orang Perawat gigi, 33 orang Bidan, 4 orang Apoteker, 5 orang Asisten Apoteker, 4 orang Tenaga Farmasi, 21 orang Sarjana Kesehatan Masyarakat, 7 orang Magister Kesehatan Masyarakat dan 38 Tenaga Kesehatan Lainnya.
- Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan pelayanan dasar diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 9

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM RSUD

Salah satu cara dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit adalah melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia RSUD. Untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas SDM RSUD tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengupayakan dengan menambah jumlah dan kapasitas tenaga pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD Kota Padang Panjang.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM RSUD dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 185.82% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Pencapaian Sasaran Strategis 9
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM RSUD

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi (%)	38	38	100	49	91.05	185.82	60	151.75

Sumber Data : RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM RSUD mencapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 185.82 % mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100 %.

- Tercapainya indikator sasaran ini dikarenakan adanya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD dimana pada kegiatan ini disediakan dana untuk kredensial tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kredensial adalah suatu proses menjamin tenaga kesehatan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kepada pasien sesuai dengan standar profesi.
- Tenaga kesehatan yang belum memiliki kompetensi tertentu tidak bisa melayani pada pelayanan kesehatan tertentu. Contohnya perawat pada IGD harus memiliki sertifikat *Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)*.
- Dengan telah dilaksanakannya kredensial tenaga kesehatan RSUD Kota Padang Panjang oleh organisasi profesi masing-masing tenaga kesehatan, memberikan kontribusi terhadap penilaian akreditasi RSUD Kota Padang Panjang dan seyogyanya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 10

Peningkatan Mutu Pelayanan

Dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, ada beberapa poin penting yang menjelaskan bahwa setiap RSUD wajib untuk meningkatkan mutu pelayanannya, sehingga Pemerintah Kota Padang Panjang harus ikut mendukung program peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit. Peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang antara lain adalah melalui akreditasi. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Mutu Pelayanan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran dengan nilai Paripurna dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Pencapaian Sasaran Strategis 10
Peningkatan Mutu Pelayanan

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Tercapainya akreditasi RSUD sesuai dengan aturan akreditasi	Tahap Penilaian	Simulasi Penilaian Akreditasi	-	Tahap Penilaian	Terakreditasi dengan nilai Paripurna	-	Tingkat Madya	Paripurna

Sumber Data : RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan Mutu Pelayanan melebihi target. Capaian kinerja tahun 2017 melebihi target dimana akreditasi RSUD Kota Padang Panjang telah mencapai Paripurna. Capaian kinerja pada tahun 2017 melebihi target apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 yang baru sampai pada tahap penilaian.

Faktor-faktor yang mendukung akreditasi dengan kelulusan paripurna antara lain :

1. Persiapan akreditasi yang mewajibkan semua petugas kesehatan/tenaga kesehatan wajib melakukan kredensial/uji kompetensi.
2. Motivasi dan semangat dari semua petugas dalam melaksanakan akreditasi sehingga akreditasi RSUD Padang Panjang mencapai nilai Paripurna.
3. Adanya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD pada sub kegiatan Bimbingan Akreditasi yang mendukung dana dan kebutuhan serta pembimbingan dari KARS, Kemenkes dan Dinas Kesehatan untuk mencapai akreditasi dengan nilai tertinggi.

Dengan terakreditasi RSUD Kota Padang Panjang dengan nilai kelulusan Paripurna diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat antarlain :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit karena berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
2. Proses administrasi, biaya serta penggunaan sumber daya akan menjadi lebih efisien.
3. Menciptakan lingkungan internal RS yang lebih kondusif untuk penyembuhan, pengobatan dan perawatan pasien.
4. Menghormati hak-hak pasien.
5. Memberikan jaminan, kepuasan serta perlindungan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kesehatan.

SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan daerah. Kinerja pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dapat tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Secara teoritis pertumbuhan ekonomi berarti proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 86.69 % dengan kriteria tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Sasaran Strategis 11
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017			Target Akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya pertumbuhan PDRB (%)	6,58	6.01	91.34	6.69	5.8	86.69	6,8	85.29

Sumber Data : Bappelitbang Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi tidak mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 86.69 % mengalami penurunan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 91.34 %.

- Sesuai dengan penghitungan PDRB dengan standar SNA 2008 , laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dipengaruhi oleh 17 lapangan usaha, diantaranya yang dominan adalah :
 1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 2. Transportasi dan Pergudangan
 3. Industri Pengolahan
- Tidak tercapainya target capaian kinerja sasaran ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, regional dan nasional yang mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 5.29 % . Hal tersebut ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seluruh

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kota Padang Panjang sebesar 5.8 %

Solusi

Untuk mengatasi rendahnya capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dibandingkan target yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Padang Panjang perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menggerakkan sektor unggulan di Kota Padang Panjang. Pembangunan Pasar Padang Panjang dan Islamic Center di Kota Padang Panjang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

SASARAN STRATEGIS 12

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Untuk menggambarkan sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat” diukur dengan indikator yang sudah umum digunakan yaitu dengan melihat angka-angka produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. PDRB Perkapitasering dijadikan acuan bagi keberhasilan suatu daerah, karena secara langsung angka ini menggambarkan potret rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu daerah dalam satu tahun. Jika pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama, maka diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pendapatan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 157.02% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Pencapaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB) (Rp)	33.797.959,-	54.780.000,-	162.08	36.929.991,-	57.990.000,-	157.02	40.062.023	144.75

Sumber Data : Bappelitbang Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat mencapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 157.02 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 yang mencapai sebesar 162.08 %.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator Meningkatnya pendapatan masyarakat dikarenakan Pemerintah Kota Padang Panjang banyak melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta program perlindungan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin untuk fokus bekerja dibidang ekonomi sehingga secara keseluruhan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk Kota Padang Panjang.

SASARAN STRATEGI 13

Meningkatkan PDRB Sektor Tersier

Struktur perekonomian yang mencerminkan ciri sebuah kota adalah lebih berkembangnya sektor tersier dibandingkan sektor-sektor lainnya . Sektor tersier tersebut meliputi sektor perdagangan, Hotel dan Restoran ; pengangkutan /telekomunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan , serta jasa-jasa. Sektor ini perlu didorong tanpa meninggalkan sektor-sektor lainnya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kota padang Panjang yang pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat . meskipun dalam perhitungan PDRD metode baru tidak dikenal lagi terminologi kelompok sektor primer, sekunder maupun tersier, namun indikator tersebut tetap dapat diukur dengan cara menyandingkan perhitungan PDRB metode lama dan metode baru.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Tersier” dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 103,84% dengan kriteria sangat tinggi. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Tersier adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya PDRB Sektor Tersier

Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB (%)	72.75	75.54*)	103.84	73.26	75.6*)	103.19	73.38	103.03

Sumber: Bappelitbang Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Tersier tahun 2017 mencapai melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 103.19 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 103.84 %. Faktor yang menyebabkan tercapainya indikator ini menunjukkan adanya kecenderungan meningkat kontribusi sektor pariwisata di Kota Padang Panjang. Peran terbesar didominasi oleh sektor hotel dan restoran yang ditandai dengan tingginya tingkat hunian hotel. Tingginya tingkat hunian hotel merupakan salah satu indikator berhasilnya promosi pariwisata di Kota Padang Panjang

SASARAN STRATEGIS 14

Meningkatnya Nilai Investasi

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal pada aktivitas tertentu yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang atau menengah dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan dampak inflasi , resiko dll yang ditanggung.

Perekonomian Padang Panjang selama ini bergantung kepad investor lokal yang bergerak diberbagai bidang seperti developer rumah, ruko, hotel, restoran, perdagangan, industri, dan lain-lain. Dengan memberikan berbagai kemudahan kepada mereka

diharapkan semakin banyak investor yang mau menanamkan modal di Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 121.98% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya nilai investasi (Rp)	590 milyar	716.80 milyar	121.49	615 milyar	750.20 milyar	121.98	640 Milyar	117.22

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Nilai Investasi tahun 2017 mencapai melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 121.98 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 121.49 %.

- Faktor-faktor yang menyebabkan Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
 1. Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap peningkatan nilai investasi yang sangat tinggi, salah satu buktinya dengan tersusunya Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Padang Padang Panjang hingga tahun 2025 di tahun 2017. Tujuan dari RUPM ini adalah menyediakan dokumen yang berisikan arahan dan strategi penanaman modal yanag dapat dijadikan pedoman perencanaan di dalam peningkatan investasi yang lebih terarah dn terpadu dengan pemanfaatan yang ada di Kota Padang Panjang hingga tahun 2025 dengan maksud agar pihak-pihak yang terkait dapat saling mengerti dan

memahami serta saling mendukung terciptanya kondisi penanaman modal/ investasi yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan serta efisien dan efektif sehingga mampu menata dan meningkatkan investasi yang lebih besar untuk mendukung percepatan pembangunan.

2. Pemerintah Kota Padang Panjang berusaha memberikan kemudahan dan kejelasan izin investasi yang ada di Kota Padang Panjang dengan mengeluarkan Ranperda tentang kemudahan investasi dan insentif penanaman modal tahun 2018. Dengan ini diharapkan investor dapat tertarik berinvestasi di Kota Padang Panjang dan mempengaruhi perkembangan investasi di Kota Padang Panjang.
3. Semenjak awal tahun 2017 berdasarkan perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menggabungkan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Ketenagakerjaan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(KPPT) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tujuan meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal/investasi di Kota Padang Panjang;
4. Selain itu seluruh izin penanaman modal sudah diupayakan memakai sistem dalam jaringan (Daring) dengan menggunakan aplikasi dari SPIPISE. Keunggulannya adalah seluruh izin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan terintegrasi secara online ke pusat, selain itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha/investor di daerah dapat terangkum langsung ke BKPM pusat, sehingga pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan pusat akan lebih cepat dan tepat sasaran.

SASARAN STRATEGIS 15

Peningkatan Daya Saing Industri Kulit.

Kota Padang Panjang sejak dulu dikenal juga sebagai daerah industri penyamakan kulit Provinsi Sumatera Barat. Pengolahan kulit selama ini diolah oleh masyarakat Padang Panjang secara tradisional. Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya merambah ke industri hilir yang mengolah kulit mentah menjadi kulit samak yang siap

pakai sebagai bahan baku industri barang jadi kulit, sampai menjadi produk kulit seperti sepatu, sandal, tas, ikat pinggang, dompet, aksesoris dan lain lain.

Untuk pengembangan industri kulit disektor hulu, Pemerintah Kota Padang Panjang mendirikan pabrik pengolahan/penyamakan kulit dengan instalasi pabrik modern agar produksi kulit yang di usahakan oleh masyarakat Kota Padang Panjang dapat diolah dengan peralatan modern sehingga menghasilkan kulit yang berkualitas baik. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Daya Saing Industri Kulit dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 17,93 % dengan kriteria sangat rendah. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Pencapaian Sasaran Strategis 15
Peningkatan Daya Saing Industri Kulit

Indikator Kinerja	Capaian 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya kapasitas produksi penyamakan kulit (ton/thn)	84 ton/thn	8.5 ton/thn	10.12	92 ton/thn	16.5 ton	17.93	100ton	16.5

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Peningkatan Daya Saing Industri Kulit belum mencapai target. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 17.93 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 10.12 %. Tidak tercapainya kapasitas produksi penyamakan kulit tahun 2017 sebanyak 16,5 ton/th disebabkan :

1. Kemampuan subsidi bahan kimia dari APBD hanya untuk 16.5 ton. Sehingga kapasitas produksi hanya 16,5 ton. Pengusaha hanya mengandalkan bahan kimia yang disubsidi pemerintah.

2. Kurangnya daya kreatifitas pengusaha kulit untuk mengolah kulit mentah menjadi kulit setengah jadi/jadi dikarenakan pengusaha kulit lebih suka menjual kulit mentahnya keluar daerah.
3. Kurangnya ketersediaan bahan mentah kulit bagi pengusaha Padang Panjang.
4. Adanya persaingan antara pengusaha kerupuk kulit dengan pengusaha pengolahan kulit dalam mendapatkan bahan baku kulit.

Solusi

- Mengaktifkan lembaga intermediate (PT. Serambi Investasi Padang Panjang) dalam pengadaan bahan baku kulit mentah dan bahan pendukung lainnya serta sebagai wadah pemasaran
- Mensosialisasikan kepada pengusaha kulit yang ada didaerah Sumatera Barat agar menyamak kulit di UPTD.

SASARAN STRATEGIS 16

Terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata

Kawasan strategis seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi , sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kota Padang Panjang dalam proses membentuk sebuah kawasan strategis pariwisata seperti dicantumkan dalam target RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 70.59% dengan kriteria sedang. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Pencapaian Sasaran Strategis 16
Terbentuknya kawasan strategis pariwisata

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Terwujudnya kawasan strategis pariwisata (%)	60	50	83.33	80	50	62.5	100	50

Sumber : Dinas Pariwisata Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator Terwujudnya Kawasan Strategis Pariwisata di Kota Padang Panjang Tahun 2017 tidak mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 62,5 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengancapaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 83.33 %.

- Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada indikator ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Pembangunan objek wisata Gua Batu Batirai masih terkendala pada proses pembebasan lahan dan kepemilikan lahan dari masyarakat adat Nagari. Sehingga promosidan pembangunan objek wisata Gua Batu Batirai tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Walaupun demikian objek wisata tersebut tetap dikunjungi oleh komunitas-komunitas tertentu seperti komunitas pecinta alam.
 2. Tidak tercapainya target yang ditetapkan pada indikator ini dikarenakan Pembangunan objek wisata Aia Tajun 7 Tingkek masih terkendala pada proses pembebasan lahan dari masyarakat sekitar dan sebagian kawasan Aia Tajun 7 Tingkek tidak sesuai dengan RTRW dan juga merupakan kawasan hutan lindung yang notabene tidak bisa dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata karena dapat mengalihkan fungsi ekologisnya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sama seperti halnya

dengan objek wisata Gua Batu Batirai objek wisata Aia Tajun 7 Tingkek tetap dikunjungi oleh komunitas-komunitas tertentu seperti komunitas pecinta alam.

Solusi :

Mengubah konsep awal pariwisata dari *Mass Tourism* menjadi *Special Interest Tourism* untuk pembangunan Objek Wisata Gua Batu Batirai dan Objek Wisata Aia Tajun 7 Tingkek karena promosi dan pembangunan objek wisata tidak bisa dilanjutkan. Disamping itu Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang untuk bisa mencari alternatif destinasi wisata lainnya sehingga terwujudnya kawasan pariwisata strategis yang akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang.

SASARAN STRATEGIS 17

Terselenggaranya kawasan pasar pusat

Padang Panjang sebagai daerah perlintasan mengandalkan jasa dalam perekonomiannya selain pariwisata, pertanian, dan lainnya. Aktivitas perdagangan dan jasa tertinggi berlangsung di pasar, sehingga pasar merupakan urat nadi dari perekonomian masyarakat. Untuk itu pembangunan pasar pusat yang representatif termasuk salah satu program multi year di Kota Padang Panjang yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD selama 2 tahun anggaran (2016 dan 2017).

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terselenggaranya kawasan pasar pusat menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 70 % dengan kriteria sedang seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 17
Terselenggaranya Kawasan Pasar Pusat

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		

Terselenggaranya kawasan pasar pusat yang representatif (%)	70	40.26	57.51	100	75	75	100	75
---	----	-------	-------	-----	----	----	-----	----

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator Terselenggaranya Kawasan Pasar Pusat belum mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 75 % mengalami peningkatan.

Rendah capaian kinerja pada indikator ini disebabkan karena lambatnya kemajuan pekerjaan oleh penyedia.

Solusi:

1. Penyedia pembangunan pasar pusat Padang Panjang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya selama 50 hari kalender berdasarkan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Permenkeu RI No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

SASARAN STRATEGIS 18

Meningkatkan Iklim Usaha /Perdagangan Yang Kondusif

Perdagangan dan jasa sebagai pemberi kontribusi yang terbesar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sangat memerlukan iklim usaha/perdagangan yang kondusif. Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan berbagai upaya yang ditetapkan dalam satu indikator yaitu Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Iklim Usaha/Perdagangan Yang Kondusif dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Pencapaian Sasaran Strategis 18
Meningkatkan iklim usaha/perdagangan yang kondusif

Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator Meningkatkan iklim usaha/perdagangan yang kondusif Tahun 2017 mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 %, capaiannya sama jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100 %.

- Pada Tahun 2017 pengaduan yang masuk pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Panjang sebanyak 5 (lima) pengaduan dan semuanya telah diselesaikan oleh Majelis BPSK Kota Padang Panjang.
- Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana kewenangan BPSK menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini antara lain :
 1. Meningkatnya kepercayaan konsumen yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK Kota Padang Panjang.
 2. Semakin diakuinya keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Panjang.

SASARAN STRATEGIS 19

Terbentuknya Kawasan Pertanian Terpadu

Sistem Pertanian Terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi peningkatan produktifitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan serta pengembangan desa secara terpadu. Agrowisata merupakan tujuan yang diharapkan dalam pengembangan kawasan pertanian terpadu di Kota Padang Panjang sehingga dijadikan sebagai salah satu sasaran strategis pembangunan Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terbentuknya Kawasan Pertanian Terpadu dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 70.59 % dengan kriteria sedang. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.26
Pencapaian Sasaran Strategis 19
Terbentuknya Kawasan Pertanian Terpadu

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Terselenggaranya kawasan pertanian terpadu (%)	0	0	0	85	60	70,59	100	60

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator Terselenggaranya kawasan pertanian terpadu Tahun 2017 tidak mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 0 %.

- Tercapainya target pada indikator ini sebesar 70.59 % apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0 % karena lahan yang sebelumnya direncanakan untuk Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu pada tahun 2016 belum berhasil didapatkan. Pada tahun 2017 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah menyelenggarakan Kawasan Pertanian Terpadu dengan memindahkan

rencana lokasi awal yang semula berada pada daerah Koto Katiak ke lahan tersedia yang berlokasi di Kawasan Rumah Potong Hewan Silaing Bawah. Pemindahan lahan kawasan pertanian terpadu dari rencana lokasi awal karena terkendala pembebasan lahan sehingga pada Tahun 2016 target untuk sasaran ini tidak tercapai.

- Penyelenggaraan pertanian terpadu antara lain adanya Rumah Potong Hewan (RPH), Peternakan Sapi Perah, Rearing Unit, Tanaman Buah, Tanaman Hias, Tanaman Toga, Sayuran dan Perikanan. Untuk tanaman sayuran tersebut dilaksanakan melalui kaji tera oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kota Padang Panjang yang hasilnya dapat diterapkan oleh petani di lapangan. Untuk Rearing Unit dimanfaatkan oleh peternak sapi perah di Kota Padang Panjang yang memiliki anak sapi betina (pedet) untuk dibesarkan di Rearing Unit tersebut sesuai dengan kaidah *Good Breeding Practice* (Pedoman Pembibitan yang Baik) oleh petugas hingga sapi tersebut bunting minimal 4 (empat) bulan dan diserahkan kembali ke peternak tersebut. Bagi Pemko Padang Panjang akan memperoleh PAD dari hasil pembesaran anak sapi tersebut ketika diserahkan kembali ke peternak pemilik. Sedangkan untuk komoditi perikanan direncanakan pada tahun 2018 ini berupa kolam ikan lele dan kolam ikan nila.
- Kondisi pada tahun 2017 ini meskipun belum 100 % dari yang direncanakan, Kawasan Pertanian Terpadu di Kota Padang Panjang telah menjadi kawasan agrowisata sebagai laboratorium magang bagi mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi. Sebagai kawasan agrowisata, KPT ini juga sering dikunjungi oleh siswa-siswa TK, SD, SMP dan SMA serta dari instansi daerah lainnya. Untuk meningkatkan kunjungan ke KPT, Dinas Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk mempromosikan kawasan agrowisata ini.

SASARAN STRATEGIS 20

Terpeliharanya proposisi RTH Terhadap Luas Wilayah, Menjadi Tidak Kurang dari 10%.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah mensyaratkan bahwa ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Demi mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan sasaran “Terpeliharanya Proporsi RTH terhadap Luas Wilayah, Menjadi tidak Kurang dari 10%. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terpeliharanya Proporsi RTH Terhadap Luas Wilayah Menjadi Tidak Kurang dari 10 % dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99.57% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Pencapaian Sasaran Strategis 20
Terpeliharanya proporsi RTH Terhadap Luas Wilayah, Menjadi Tidak Kurang dari 10%.

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	8	6.02	75.25	7	6.97	99.57	10	69.7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah menjadi tidak Kurang dari 10 %,tidak mencapai target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 99.57 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 75.25 %.

- Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Panjang sebesar lebih kurang 160.232 Ha dari total luas wilayah sebesar 2300 Ha, sehingga total luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebesar 6.97 %.
- Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator ini adalah :
 1. Sulitnya pembebasan lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau
 2. Keterbatasan luas lahan yang tersedia.

Solusi

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyisakan ruang terbuka hijau dilokasi pemukiman masing-masing.
2. Mempersyaratkan penyediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat serta pemilik usaha /kegiatan yang akan mengurus izin usaha atau izin mendirikan pembangunan.
3. Dinas PUPR Kota Padang Panjang tetap menganggarkan dana untuk pengadaan tanah untuk RTH.

SASARAN STRATEGIS 21

Mengurangi Timbulan Sampah

Sampah merupakan masalah klasik yang kerap timbul dalam kehidupan sehari-hari. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah yang menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota yang sering mendapatkan predikat sebagai kota bersih dengan beberapa kali memperoleh penghargaan Adipura, selalu berusaha untuk tetap mempertahankan predikat tersebut, sekaligus berkomitmen untuk terus mengurangi timbulan sampah melalui berbagai kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Mengurangi Timbulan Sampah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100.01 % dengan kriteria

sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Pencapaian Sasaran Strategis 21
Mengurangi Timbulan Sampah

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Berkurangnya Volume Sampah Yang Masuk ke TPA (%)	79	79	100	77	76.99	99,99	75	97.34

Sumber : Dinas Perkim-LH Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Mengurangi Timbulan Sampah mencapai melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 99,99 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100 %.

- Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target pengurangan sampah yang masuk ke TPA ini tidak terlepas dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang yang tujuan akhirnya adalah melakukan pengelolaan sampah dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan, dan pengolahan sampah sehingga sampah yang masuk ke TPA menjadi berkurang. Rata-rata timbulan sampah Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebanyak 132,735 m³/hari sementara rata-rata timbulan sampah yang masuk ke TPA adalah sebanyak 102.2 m³/hari. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:
 - Sosialisasi pengolahan sampah organik dan an organik kepada masyarakat di 16 kelurahan di Kota Padang Panjang sekaligus pemberian wadah kompos.
 - Sosialisasi Program Kali Bersih bagi masyarakat di sepanjangbantaran sungai untuk menjaga sungai dengan mengolah sampai organik menjadi kompos.

- Penyediaan tempat sampah terpilah dan gantungan sampah yang disebar di 16 kelurahan di Kota Padang Panjang.
- Pelatihan dan pembinaan kepada 7 (tujuh) bank sampah yang ada di Kota Padang Panjang. Keberadaan bank sampah ini sangat membantu dalam menampung sampah terpilah dari masyarakat, sehingga sampah yang masuk ke TPA menjadi berkurang.
- Sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyata (sekolah berbudaya lingkungan) yang menjalin kerjasama pengelolaan sampah dengan Bank sampah.
- Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional “ Tukar Sampah dengan Sembako” tahun 2017 yang mendapat sambutan baik dari masyarakat dan kalangan pendidikan. Semua sampah anorganik yang terkumpul pada acara tersebut sebanyak 2,6 ton langsung dikelola oleh Bank Sampah sehingga sampah yang masuk ke TPA menjadi berkurang.

SASARAN STRATEGI 22

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Pembangunan kota yang berkelanjutan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan , air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain-lain yang harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan efek negatif yang merugikan masyarakat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran terdiri dari; Indikator Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih menunjukkan capaian kinerja sebesar 98.66 % dengan kriteria sangat tinggi ; Indikator Meningkatnya Pengelolaan Drainase menunjukkan capaian kinerja sebesar 103.52 % dengan kriteria sangat tinggi; Indikator Meningkatnya Ketersediaannya Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi menunjukkan capaian kinerja sebesar 161.3 % dengan kriteria sangat tinggi; Indikator Meningkatnya Kualitas Fasilitas Lalu Lintas menunjukkan capaian kinerja sebesar 137.16 % dengan kriteria sangat tinggi ; Indikator Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi

Umum menunjukkan capaian kinerja sebesar 162.69 % dengan kriteria sangat tinggi
Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Pencapaian Sasaran Strategis 22
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Indikator Kinerja	Capaian 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya cakupan layanan air bersih (%)	82.84	77.2	93.19	94.4	93.14	98.66	86	108.30
Meningkatnya pengelolaan drainase (%)	85.72	82	95.66	87.86	90.92	103.48	90	101.02
Meningkatnya ketersedianya infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (%)	54	81.40	150.74	62	100	161,3	70	142.86
Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas (%)	52	99.88	192.08	56	76,81	137,16	60	128,01
Meningkatnya ketersedian prasarana dan sarana transportasi umum (%)	51	85.26	167.18	58	94.32	162.69	65	145.17

Sumber : Dinas Perkim-LH, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan belum mencapai target dan 4 indikator telah melebihi target. Capaian kinerja untuk Indikator Meningkatnya cakupan layanan air bersih pada tahun 2017 sebesar 98. 66 % mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 93.19 %. Capaian kinerja untuk

indikator Meningkatnya pengelolaan drainase pada tahun 2017 sebesar 103.48 % mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 95.66%. Capaian kinerja untuk indikator Meningkatnya ketersedianya infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 161.3 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 150.74 %. Capaian kinerja untuk indikator Meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas pada tahun 2017 sebesar 137,16 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 192.08 %. Capaian kinerja untuk indikator Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum pada tahun 2017 sebesar 162.69 % mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 167.18 %.

- Indikator Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih belum mencapai target karena masih belum tersedianya jaringan pipa distribusi ke rumah-rumah penduduk sebesar 1.26 % dari target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2017 PDAM Kota Padang Panjang melayani sekitar 91.14 % air bersih ke rumah penduduk sebanyak 47.131 orang dari total penduduk Kota Padang Panjang sebanyak 51.712 orang. Sedangkan 2 % layanan air bersih untuk daerah sekitar Ganting Sigando, Ekor Lubuk dan Batagak dialirkan dari sumber mata air Paninjauan dengan menggunakan infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang telah diserahkan kepada Kelompok Masyarakat yang mengelolanya.
- Indikator Meningkatnya Pengelolaan Drainase melebihi target karena komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal penganggaran untuk peningkatan sarana prasarana perkotaan. Drainase Kota Padang Panjang dikelola oleh 2 (dua) OPD yaitu Dinas PUPR dan Dinas Perkim Lingkungan Hidup. Total panjang drainase keseluruhan Kota Padang Panjang Tahun sampai dengan Tahun 2017 adalah 118.360,7 m. Jumlah panjang drainase pada tahun 2016 dalam kondisi baik sepanjang 101.215 m dan jumlah panjang drainase pada tahun 2017 dalam kondisi baik sepanjang 6.397,4 m. Dari panjang drainase 6.397,4 m tersebut, 4250 m dikelola oleh Dinas Perkim LH dan sisanya dikelola oleh Dinas PUPR. Dari data tersebut diketahui bahwa 90.92 % drainase Kota Padang Panjang dalam kondisi baik. Kondisi

drainase yang baik bermanfaat untuk mengurangi genangan air/banjir, penyaluran hasil pengolahan air kotor dan mengurangi kawasan kumuh di Kota Padang Panjang. Faktor-faktor pendorong capaian keberhasilan indikator ini tidak terlepas dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim LH dan Dinas PUPR serta konsultan Program KOTAKU antara lain ; Program Bangunan Pembawa Air Kotor; Pemeliharaan Prasarana Permukiman; BOP Kegiatan KOTAKU; Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

- Indikator Meningkatnya Ketersediaannya Infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi mencapai melebihi target karena jaringan interkoneksi dalam bentuk jaringan fiber optic serta jaringan internet telah tersedia pada 24 OPD, 16 Kelurahan, 4 Puskesmas dan 10 lokasi layanan wifi gratis bagi masyarakat serta semua sekolah SD dan SMP di lingkungan Kota Padang Panjang. Berkaitan dengan telah tersedianya jaringan interkoneksi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dilengkapi dengan akses internet pada lembaga serta titik kumpul masyarakat tersebut akses masyarakat terhadap informasi dan perkembangan teknologi lebih mudah, murah dan cepat. Bagi dunia pendidikan metode pembelajaran lebih variatif dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Dalam hal pelayanan publik dengan adanya jaringan interkoneksi Pemerintah Kota Padang Panjang telah mulai melaksanakan layanan publik yang berbasis elektronik diantaranya e-pemerintahan yang digunakan sebagai sistem informasi pelayanan perizinan, surat menyurat administrasi pemerintahan dan kependudukan yang telah berjalan dari kelurahan sampai kecamatan. Bagi internal pemerintahan, dengan tersedianya jaringan interkoneksi layanan pemerintahan telah memenuhi indikator pertama untuk mewujudkan *smart city* yaitu infrastruktur teknologi informasi.
- Indikator Meningkatnya Kualitas Fasilitas Lalu Lintas mencapai melebihi target karena terlaksananya komitmen penganggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas pada tahun 2017. Kondisi rambu-rambu lalu lintas yang baik sebanyak 580 unit dari 797 unit yang ada, kondisi traffic light yang baik sebanyak 4 unit dari 7 unit yang ada, kondisi warning light yang baik sebanyak 14 unit dari

19 unit yang ada, kondisi halte yang baik sebanyak 21 unit dari 24 unit yang ada dan kondisi cermin tikung yang baik sebanyak 27 unit dari 28 unit yang ada. Dengan meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas diharapkan meningkatnya disiplin pengguna jalan dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

- Indikator Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum mencapai melebihi target karena terlaksananya pemeliharaan angkutan umum pada tahun 2017 sebanyak 83 unit angkutan umum dari 88 unit yang dibutuhkan.

SASARAN STRATEGI 23

Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Perbaikan tingkat kesejahteraan Masyarakat merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018. Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal tersebut adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dimana angka ini juga berbanding lurus dengan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Perkotaan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran terdiri dari; Indikator Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan capaian kinerja sebesar 89.12 % dengan kriteria rendah ; Indikator Penurunan Angka Pengangguran menunjukkan capaian kinerja sebesar 70.45 % dengan kriteria sedang; Indikator Persentase Penurunan PMKS menunjukkan capaian kinerja sebesar 138.75 % dengan kriteria sangat rendah. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Pencapaian Sasaran Strategis 23
Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		

Penurunan Angka Kemiskinan(%)	5.90	6.37	92.62	5.70	6.32	89.12	5.5	87.03
Penurunan Angka Pengangguran (%)	4.60	6.21	74.07	4.40	5.70	70.45	4.2	73.68
Persentase Penurunan PMKS (%)	1.00	5.46	18.32	4.8	2.94	138.75	5	58.8

Sumber : Bappelitbang, Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat tidak mencapai target. Capaian kinerja untuk Indikator Penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 89.12% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 92.62 %. Capaian kinerja untuk indikator Penurunan Angka Pengangguran pada tahun 2017 sebesar 70.45 % mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 74.07 %. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 138.75 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 18.32 %

- Faktor-faktor yang mempengaruhi masih belum tercapainya target Penurunan Angka Kemiskinan dikarenakan perekonomian Kota Padang Panjang sebagai kota kecil yang cenderung ikut kondisi perekonomian regional serta pola pikir masyarakat yang tidak ingin keluar dari kemiskinan sementara PMKS bertambah sehingga penurunan angka kemiskinan menjadi tidak signifikan.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi masih belum tercapainya target Penurunan Angka Pengangguran dikarenakan sempitnya peluang kerja dalam sektor formal di Kota Padang Panjang serta mempunyai keahlian tenaga kerja yang ada di Kota Padang Panjang sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Padang Panjang.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi masih belum tercapainya target Persentase Penurunan Jumlah PMKS pertahun dikarenakan:

1. Posisi Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan sehingga mobilitas orang terlantar cukup tinggi.
2. Masih kurangnya pembinaan terhadap PMKS khususnya wanita rawan sosial
3. Masih terbatasnya anggaran untuk pembinaan lansia terlantar dan masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyandang cacat berat.

Solusi

1. Memberikan kesadaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan dan terintegrasi sehingga KPM bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang bisa memberikan bantuan seperti kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Pangan dan Pertanian bagi kelompok tani serta Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang. Data KPM diambil dari Basis Data Terpadu yang diambil dari Kementerian Sosial.
3. Untuk menurunkan angka pengangguran kebijakan yang dilaksanakan dinas terkait adalah :
 - a. Melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja.
 - b. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Pelatihan tidak hanya fokus untuk mencari pekerjaan tetapi juga menciptakan lapangan kerja.
 - c. Penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja. Beberapa perusahaan luar negeri menyampaikan informasi melalui media massa dan ditempat keramaian.
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berwenang dalam hal ketenagakerjaan memfasilitasi mulai dari penyebarluasan informasi sampai keberangkatan dan melindungi tenaga kerja selama bekerja di luar negeri. Disamping itu Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memfasilitasi lulusan SMK untuk bekerja di perusahaan swasta dalam negeri maupun luar negeri.
4. Untuk menurunkan Persentase Penurunan Jumlah PMKS, dinas terkait melakukan :
 - a. memaksimalkan fungsi rumah singgah sehingga dapat menampung orang terlantar.

- b. Memberikan pembinaan kepada wanita rawan sosial ekonomi untuk meningkatkan kemandiriannya.
- c. Pendampingan bagi lansia terlantar dan orang dengan kecacatan berat.

SASARAN STRATEGIS 24

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan penerapan ABS SBK

Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Khitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat Minang Kabau mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya (adat) dengan norma-norma agama islam. Artinya nilai-nilai agama Islam dijadikan dasar oleh masyarakat dalam menajalankan nilai-nilai sosial budaya dan terus dan terus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan masyarakat.

Di Kota Padang Panjang yang dijuluki kota *SERAMBI MEKKAH* , pola kehidupan tersebut telah menjadi perhatian bagi masyarakat salah satu contoh, masalah kemiskinan di Kota Padang Panjang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang, akan tetapi masyarakat juga turut bertanggung jawab. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 102.88 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Pencapaian Sasaran Strategis 24
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (Rp)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya jumlah zakat, sadakah yang dikumpulkan BAZ (Rp)	3 Milyar	3.792 Milyar	126.4	3 Milyar	3.086.467.261,-	102.88	3,Milyar	93.53

Sumber Data: Bagian Kesra Setdako Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator Meningkatnya jumlah zakat, sedekah yang dikumpulkan BAZ Tahun 2017 telah mencapai target. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 102.88 % mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 126.4 %.

- Penurunan penerimaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Kota Padang Panjang dikarenakan berkurangnya penerimaan zakat dari Guru guru SMA, karena pengelolaan SMA menjadi kewenangan Propinsi Sumatera Barat.
- Di Kota Padang Panjang yang di juluki kota *SERAMBI MEKKAH* , pola kehidupan tersebut telah menjadi perhatian bagi masyarakat salah satu contoh, masalah kemiskinan di Kota Padang Panjang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang, akan tetapi masyarakat juga turut bertanggung jawaab. Ini dapat kita lihat dari kepedulian seluruh lapisan masyarakat dalam membayar zakat dan sedekah yang dikoordinir melalui BAZ Kota Padang Panjang.
- Dari capaian realisasi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Padang Panjang telah terbantu sekian banyak Masyarakat fakir dan miskin yang masuk kategori yang berhak menerima zakat sesuai dengan program kerja BAZNAS Kota Padang PADANG Tahun 2017.
- Penyaluran dana zakat selama tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. Pemberian modal usaha bagi masyarakat sebesar Rp.1.214.750.000,- bagi 452 orang warga Padang Panjang
 - b. Bantuan untuk biaya pendidikan sebesar Rp.618.186.000,- bagi 437 orang pelajar dan mahasiswa asal Padang Panjang.
 - c. Bantuan untuk biaya pengobatan untuk 75 orang sebesar Rp. 140.437.500
 - d. Bantuan untuk biaya konsumsi lansia BAZ sebesar Rp. 974.800.000,-
 - e. Bantuan kemanusiaan (musafir, Rohingya, korban kebakaran, khitanan massal, korban banjir) sebesar Rp. 80.610.000,-
 - f.

SASARAN STRATEGIS 25

Meningkatkan Prestasi Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat secara terencana dan sistematis.

Peningkatan prestasi olahraga dilakukan secara berjenjang dengan menggali bibit-bibit olahragawan/atlet di sekolah-sekolah, atau melalui pembinaan yang intensif melalui klub-klub, serta pemusatan latihan pada tingkat Kota di setiap Cabang Olahraga. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Prestasi Olahraga dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 113.33% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Pencapaian Sasaran Strategis 25
Meningkatkan Prestasi Olahraga

Indikator Kinerja	Capaian 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif (cabor)	11	15	136.36	15	17	113.33	18	94.44

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga mencapai melebihi target. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 113. 33 % mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 136. 36 %.

- Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif pada tahun 2017 karena telah aktifnya KONI Padang Panjang. Secara administratif setiap pengurus cabang olahraga harus mengaktifkan kepengurusan dengan membuat SK Kepengurusan.

- Bagi cabang yang telah aktif kepengurusan maka akan diusulkan oleh KONI Kota Padang Panjang untuk diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Jumlah cabang olahraga yang aktif adalah PASI, GABSI, FPTI, PGSI, PJSI, PERBASI, PERKEMI, PERBAKIN, PRSI, TI, PABBSI, PBVSI, KODRAT, PBSI, PSTI, PERTINA, dan FAJL.
- Dengan aktifnya 17 cabang olahraga tersebut dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang cukup memadai diantaranya GOR Bancahlaweh, Lapangan Anas Karim, Hall Bulutangkis Nagari Gunung, Kolam Renang Lubuk Mata Kucing, Lapangan Tennis Secata B, Lapangan Tembak Secata B dan berbagai sarana olahraga di Kota Padang Panjang diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga di Padang Panjang.

SASARAN STRATEGIS 26

Meningkatnya Kegiatan Seni dan Budaya

Pelestarian seni dan budaya daerah oleh generasi muda di Kota Padang Panjang diwujudkan dalam bentuk kegiatan seni dan budaya pada sanggar seni yang ada di Kota Padang Panjang. Keaktifan sanggar seni diharapkan dapat menjadi wadah kreatifitas dan mampu menggali potensi seni budaya yang dimiliki oleh generasi muda di Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kegiatan Seni dan Budaya dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 109.09% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Pencapaian Sasaran Strategis 26
Meningkatnya Kegiatan Seni dan Budaya

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		

Meningkatnya jumlah sanggar seni yang aktif.	20	21	105	22	24	109.09	24	100
--	----	----	-----	----	----	--------	----	-----

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Kegiatan Seni Budaya mencapai melebihi target. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 109.09% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 105 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah sebagai berikut

1. Program pengembangan seni dan budaya yang dilaksanakan melalui pembinaan dan pelatihan tari dan musik, randai, qasidah rebana, silat, gamad kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
2. Adanya event-event yang bisa dijadikan ajang untuk penampilan atraksi seni dan budaya sebagai media promosi baik dilaksanakan di luar dan dalam Kota Padang Panjang, yaitu dengan penyelenggaraan Festival Serambi Mekkah dan Fesitval Budaya Daerah dalam rangka HUT Kota Padang Panjang serta pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar daerah.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan seni dan budaya yang ada di Kota Padang Panjang, yaitu melalui kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Selain itu, faktor keberadaan Institut Seni Indonesia(ISI) Padang Panjang juga sebagai salah satu faktor pendukung perkembangan kegiatan seni dan budaya di Kota Padang Panjang.
4. Sanggar seni juga aktif di sekolah-sekolah melalui kegiatan fasilitasi perkembangan keragaman budaya dapat menumbuhkan motivasi kepada sekolah untuk meningkatkan pembelajaran seni dan budaya sehingga terbangunnya karakter anak bangsa berbasis seni budaya.

Adapun sanggar seni yang aktif tersebut adalah :

1. Sanggar Alang Bangkeh
2. Sanggar Sikambang Manih
3. Sanggar Aguang
4. Sanggar Titian Aka

5. Sanggar Taruko
6. Sanggar Siganjua Lalai
7. Sanggar Rangkiang
8. Sanggar Sikambang Manih
9. Sanggar Jalo Suto
10. Sanggar Puti Bungsu
11. Sanggar Mayang Taurai
12. Sanggar Puti Andam Dewi
13. Sanggar Merah Sago
14. Sanggar Gugus Gunuang
15. Sanggar Talang Sarunai
16. Sanggar Siti Nurlela
17. Sanggar Aua Sarumpun
18. Sanggar Aguang II
19. Sanggar Busur Saiyo
20. Sanggar Tirai Batarawang
21. Sanggar Busur Saiyo
22. Sanggar Balabek Gadang
23. Sanggar Lembuti
24. Sanggar Bungka Piawai

SASARAN STRATEGIS 27

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan demi terwujudnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan pemberdayaan perempuan. Peningkatan pemberdayaan perempuan ini dapat dilihat antara lain dari indeks pembangunan Gender (IPG) dan indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks

Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang mencerminkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari perempuan . sementara itu pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran belum terealisasi.

Tabel 3.34
Pencapaian Sasaran Strategis 27
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
IPG Kota Padang Panjang	79.11	98.56*)	124.60	79.55	79.55*)	100	80	123.2
Meningkatnya IDG Kota Padang Panjang	79.03	73.3*)	92.75	79.55	79.55*)	100	81	90.49

**)angka proyeksi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan telah mencapai target. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator IPG Kota Padang Panjang sebesar 100% pada tahun 2017 sebesar 100% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 124.60 % dan capaian kerja untuk indikator IDG Kota Padang Panjang sebesar 100% pada tahun 2017 sebesar 100% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 92,75%.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator karena telah terbentuknya kelompok kerja PUG Kota Padang Panjang dan APBD telah responsif gender.

SASARAN STRATEGI 28

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pembangunan suatu daerah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah haruslah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pengecualian.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan diwujudkan melalui keikutsertaan wakil masyarakat yang duduk didalam lembaga perwakilan rakyat daerah setiap tahunnya di kegiatan musrenbang dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan secara sukarela melalui kegiatan Manunggal Sakato sebagai salah satu wujud semangat gotong royong dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Pencapaian Sasaran Strategis 28
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang(%)	98.08	97.56	99.47	98.54	98.54	100	99	99.53

Sumber : Bappelitbang Tahun 2017 Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan mencapai target. Capaian kinerja sasaran

pada tahun 2017 sebesar 100 % mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 99.47 %.

- Tingginya capaian kinerja ini disebabkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya musrenbang bagi kemajuan dan pembangunan di Kota Padang Panjang. Hal ini dipicu oleh banyaknya aspirasi masyarakat yang bisa ditampung dalam APBD.
- Keterwakilan masyarakat dalam menghadiri Musrenbang meliputi unsur dari Perangkat RT, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Unsur Sekolah dan Pengusaha. Diharapkan dengan keterwakilan unsur dari seluruh lapisan masyarakat dapat menyaring aspirasi seluruh masyarakat.

SASARAN STRATEGI 29

Menekan Angka Kelahiran

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,9 juta jiwa dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,49 per tahun. Jika pertumbuhan penduduk tetap 1,49% maka secara kuantitas penduduk Indonesia tumbuh 3,5 – 4 per tahun. Kondisi tersebut membawa dampak dan pengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan nasional. Disatu sisi jumlah anak banyak akan menurunkan kemampuan investasi sumber daya manusia (SDM) dalam keluarga. Menyadari hal itu Pemerintahan Kota Padang Panjang telah menetapkan sasaran Menekan Angka kelahiran dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 . Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menekan Angka Kelahiran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 180.11 % dengan

kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36
Pencapaian Sasaran Strategis 29
Menekan Angka Kelahiran

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Target akhir RPJMD (2018) (%)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
Menurunnya Angka Kelahiran (%)	1.92	1.61*)	116.14**)	1.86	0.37	180.11	1.8	20.55

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2017

**) angka koreksi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Menurunnya Angka Kelahiran mencapai melebihi target. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 180.11 % mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 116.14 %.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Menurunnya Angka Kelahiran di Kota Padang Panjang adalah :
 1. Adanya kerjasama antar lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan.
 2. Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang sebanyak 7417 PUS dan yang menjadi peserta KB aktif adalah sebanyak 5.195 PUS.
 3. Kegiatan Pelayanan KB di dukung oleh 520 Kader KB di Tingkat Kelurahan dan tersedianya sarana (Mobil, Penerangan, Mobil Pelayanan, dan Mobil Pembawa Akseptor KB dan mobil pemabawa alat kontrasepsi).

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 29 Sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2017 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.37
Pencapaian Kinerja Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
		Pagu/Target	Realisasi	%Realisasi
Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	- Penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan	247.937.500	215.614.071	86,96
	- Peningkatan kualitas pelayanan publik	96.300.000	77.019.889	79,98
	- Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	28.510.000	27.920.025	97,93
	- Penyusunan dan penerbitan JRA	20.095.000	20.076.000	99,91
	- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	302.905.000	268.254.000	88,56
	- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	155.687.500	137.344.400	88,22
	- Perencanaan pembangunan daerah	248.310.000		0,00
	- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.098.079.500	1.712.813.226	81,64
Mengembangkan Sistem Rekrutmen, Promosi Dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai Dengan Kebutuhan organisasi	- Pembinaan dan pengembangan aparatur	1.185.233.400	659.947.751	55,68
Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	- Pendidikan non formal	483.456.750	283.006.472	58,54

Menuntaskan program belajar 12 tahun	- Wajib belajar pendidikan dasar	23.127.995.055	13.372.149.299	57,82
Membangun kecerdasan anak usia dini	- Pendidikan anak usia dini	2.464.628.500	2.213.123.444	89,80
Peningkatan PHBS	- Upaya kesehatan masyarakat	8.240.897.349	4.868.726.819	59,08
	- Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	345.433.000	302.139.325	87,47
	- Pengembangan lingkungan sehat	137.020.000	120.885.375	88,22
	- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	269.064.500	252.806.200	93,96
	- Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	333.949.900	285.242.800	85,41
Meningkatnya status gizi masyarakat	- Perbaikan gizi masyarakat	106.970.000	95.823.175	89,58
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD	- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	47.654.337.250	47.043.734.803	98,72
Peningkatan mutu pelayanan	- Pengadaan, peningkatan sarana prasaran rumah sakit/rs jiwa/rs paru-paru/rs mata	20.928.170.350	18.648.325.102	89,11
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	- Perencanaan pembangunan ekonomi	941.640.000	882.187.750	93,69
Meningkatnya pendapatan masyarakat	- Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	31.925.000	31.204.300	97,74
Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	- Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	708.595.000	655.751.062	92,54
Meningkatnya nilai Investasi	- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	250.000.000	245.170.926	98,07
Peningkatan daya saing industri kulit	- Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	667.875.500	481.253.700	72,06
	- Pengembangan sentra industri potensial	803.907.728	679.430.038	84,52

Terbentuknya kawasan strategis pariwisata	- Pengembangan pemasaran pariwisata	4.264.640.000	3.733.662.958	87,55
	- Pengembangan objek wisata unggulan	1.753.539.000	1.474.634.356	84,09
	- Pengembangan destinasi pariwisata	1.019.545.000	972.966.925	95,43
Mengembangkan kawasan pasar pusat	- Peningkatan efisien perdagangan dalam negeri	130.006.500	121.686.975	93,60
Meningkatkan iklim usaha atau perdagangan yang kondusif	- Pengembangan IKM	1.749.190.000	1.649.006.057	94,27
Terbentuknya kawasan pertanian terpadu	- Peningkatan ketahanan pangan, pertanian/perkebunan	194.450.000	182.125.575	93,66
	- Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan	736.000.000	607.822.700	82,58
	- Peningkatan produksi hasil peternakan	1.738.115.000	932.991.575	53,68
Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah, menjadi tidak kurang dari 10 %	- Pengelolaan ruang terbuka hijau	4.781.782.500	4.371.249.196	91,41
Mengurangi timbulan sampah	- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	7.222.940.200	6.691.355.876	92,64
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	- Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	3.977.757.600	3.085.891.100	77,58
	- Bangunan air kotor	3.384.234.198	3.495.580.000	103,29
	- Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	4.323.120.000	3.875.379.000	89,64
	- Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	3.433.460.000	3.221.023.808	93,81
	- Fasilitasi peningkatan sdm bidang kominfo	154.965.000	104.972.450	67,74
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	276.200.000	254.466.950	92,13

	- Peningkatan pelayanan angkutan	767.525.000	631.957.963	82,34
	- Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	471.135.000	428.925.625	91,04
Perbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat	- Pemberdayaan fakir miskin, kat dan penyandang masalah sosial	63.593.000	62.638.300	98,50
	- Pembinaan anak terlantar	55.896.500	30.876.807	55,24
	- Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	111.415.900	106.979.740	96,02
	- Peningkatan kesempatan kerja	63.575.000	43.848.000	68,97
	- Perlindungan pengembangan lembaga ketanagakerjaan	50.050.000	20.575.000	41,11
	- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	313.136.500	282.621.658	90,26
	- Pembinaan penyandang penyakit sosial (eks narapida, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	158.620.000	80.066.000	50,48
meningkatkan pemberdayaan perempuan	- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	190.400.000	188.471.163	98,99
	- Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	150.000.000	139.942.500	93,30
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	561.786.250	454.000.753	80,81
Menekan angka kelahiran	- Keluarga berencana	2.196.957.500	2.025.511.292	92,20
	- Kesehatan reproduksi remaja	559.250.000	547.454.194	97,89
	- Pelayanan kontrasepsi	74.000.000	50.524.300	68,28

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017

Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Mengupayakan peningkatan kunjungan wisatawan
4. Mengupayakan peningkatan waktu rata-rata lama menginap wisatawan
5. Penerapan inovasi teknologi produksi serta memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
6. Optimalisasi kelembagaan UMKM
7. Mendorong berkembangnya sektor UMKM
8. Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industri
9. Menyesuaikan dokumen perencanaan jangka panjang dan tata ruang wilayah
10. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor
11. Peningkatan kualitas produk, kemasan dan jaringan pemasaran IKM
12. Meningkatkan peran lembaga penyaluran dana bergulir
13. Mendorong UMKM dan Koperasi mengakses modal dari lembaga penyaluran dana bergulir
14. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
15. Menumbuhkan koperasi-koperasi yang beranggotakan pelaku usaha sejenis (sektor riil)
16. Mengoptimalkan kinerja koperasi
17. Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit
18. Membangun kawasan strategis pariwisata yang didukung oleh stakeholder terkait dengan berbasis pada wisata alam, budaya lokal, kuliner dan produk unggulan daerah

19. Mengoptimalkan pengelolaan PIHP
20. Penataan kawasan perdagangan Bukit Surungan yang dititikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung
21. Penataan kawasan pasar pusat
22. Mengoptimalkan kinerja pengawasan
23. Pembentukan UPTD kemetrolagian
24. Mensinergikan pengembangan sektor pertanian, perternakan dan perikanan dalam satu kawasan

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut diatas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 diarahkan dalam yaitu :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
2. Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW
3. Optimalisasi pemasaran pariwisata
4. Membenahi objek wisata yang telah ada dan mengembangkan objek wisata baru
5. Intensifikasi pertanian
6. Peningkatan kelembagaan UMKM
7. Fasilitasi pelaku UMKM sesuai bidang usaha
8. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Propinsi dan Pusat terkait pengembangan industri kapur
9. Melaksanakan revisi RPJP dan RTRW
10. Menyusun Perda tentang investasi
11. Meningkatkan sarana prasarana produksi IKM unggulan
12. Meningkatkan motivasi pelaku IKM unggulan
13. Mengembangkan desain kemasan untuk berbagai produk kemasan
14. Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran
15. Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha

16. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
17. Penambahan modal BLUD UPTD pengelolaan dana bergulir
18. mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi
19. meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk
20. Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi
21. Optimalisasi UPTD Pengolahan Kulit
22. Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit
23. Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit
24. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan kepariwisataan
25. Memberikan insentif investasi sesuai kewenangan daerah
26. Meningkatkan peran serta dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan PIHP
27. Mengoptimalkan fungsi terminal, memperlancar arus lalu lintas orang dan barang
28. Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan
29. Revitalisasi pasar pusat
30. Penyempurnaan aturan dan sistem pengelolaan pasar
31. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen
32. Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD Kemetrollogian
33. Menyediakan sarana prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 755.647.398.631,39** dengan rincian sebagai berikut:

➤ **Pendapatan :**

Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.591.108.789.400,00 setelah perubahan sebesar Rp.609.996.061.007,00
(bertambah Rp. 18.887.271.607,00).

➤ **Belanja :**

Belanja sebelum perubahan sebesar Rp.712.603.004.705,00 setelah perubahan menjadi Rp. 755.647.398631,39.

(bertambah Rp. 43.044.393.926,39).

➤ **Pembiayaan :**

a. **Penerimaan**

Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp. 121.494.215.305,00 setelah perubahan sebesar Rp. 145.651.337.624,39,

(bertambah Rp. 24.157.122.319,39).

b. **Pengeluaran**

Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.145.651.337.624,39

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

- a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- b. Percepatan ifrastuktur pendukung aktifitas ekonomi masyarakat;
- c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;
- e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kota Padang Panjang lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendatan Daerah dikelompokkan kedalam **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.38
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017
Per 31 Desember 2017

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Pendapatan :			
a.Pendapatan Asli Daerah	87.942.928.085,00	6.906.484.293,00	100,61
Hasil pajak daerah	6.864.652.208,00	6.906.484.263,00	100,61
Hasil retribusi daerah	5.085.970.000,00	4.134.303.831,39	81,29
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.693.432.872,00	7.693.432.872,00	100
Lain-lain PAD yang sah	68.298.873.005,00	70.099.189.599,28	102,64
b.Dana Perimbangan	459.607.837.058,00	439.519.041.267,00	95,63
Dana bagi hasil pajak	10.462.242.554,00	9.882.566.220,00	94,46
Dana bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam	2.088.637.504,00	1.091.771.997,00	52,27
Dana alokasi umum	375.436.356.000,00	375.436.356.000,00	100
Dana alokasi khusus	71.620.601.000,00	53.108.347.050,00	74,15

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	19.208.927.864,00	19.470.446.788,00	101,36
Dana Penyesuaian	42.836.368.000	42.836.362.000,00	100
Bantuan Pemerintah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	100
c.Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	
Pendapatan Dana Darurat	0	0	
Pendapatan lainnya	0	0	
Jumlah Pendapatan Daerah	609.996.061.007,00	591.059.266.620,67	96,90

Sumber : DPKAD Kota Padang Panjang

Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja di upayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan eefektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja daerah dikelompokkan

kedalam **Belanja Opreasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga** dan **Transfer** masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.39
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Per 31 Desember 2017

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah :			
a.Belanja Operasi	468.234.739.063,39	396.120.857.858,76	84,60
Belanja Pegawai	217.349.711.179,39	192.194.308.914,00	84,60
Belanja Barang dan Jasa	237.678.642.684,00	195.378.113.844,76	82,20
Belanja Bunga	0	0	
Belanja Subsidi	0	0	
Belanja Hibah	12.920.287.200,00	8.440.035.100	65,32
Belanja Bantuan Sosial	261.148.000,00	108.400.000,00	41,51
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	
b.Belanja Modal	300.817.600.408,00	211.509.246.179,23	70,31
Belanja Tanah	2.000.000.000,00	1.929.976.000,00	96,50
Belanja Peralatan dan mesin	28.334.468.527,00	24.446.818.309,55	86,28
Belanja Gedung dan Bangunan	209.275.324.420,00	138.552.788.735,41	66,21
Belanja Jalan , irigasi dan Jaringan	51.703.522.198,00	42.481.658.211,27	82,16
Belanja aset tetap dan lainnya	9.504.285.263,00	4.098.004,923,00	43,12
c.Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	-	-
d.Transfer	560.000.000,00	478.108.378,00	85,38
Bagi Hasil Pajak	6.864.652.208,00	6.906.484.263,00	100,61
Bagi Hasil Retribusi			

Bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya/ Pemerintah Desa	0	0	
Bantuan Keuangan Lainnya	560.000.000,00	478.108.378,00	58,38
Jumlah Belanja Daerah	770.052.339471,39	607.630.104.037,99	78,91

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan probabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.40
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017
Per 31 Desember 2017

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
Pembiayaan :			
a.Penerimaan Daerah			
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	145.651.337.624,39	145.651.337.624,39	100
Pencairan Dana Anggaran	0	0	
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	
Penerimaan Dana Talangan	0	0	
Jumlah Penerimaan Daerah	145.651.337.624,39	145.651.337.624,39	100
b.Pengeluaran Daerah	0	0	
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0	0	
Dana Penyesuaian	0	0	
Pembiayaan Pokok Utang	0	0	
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	
Pengeluaran Dana Talangan	0	0	
Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0	0	
Jumlah Pengeluaran Daerah	145.651.337.624,39	145.651.337.624,39	100
Jumlah Pembiayaan	145.651.337.624,39	145.651.337.624,39	100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	14.64.940.840,00	128.606.014.888,07	859.38

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang



PENUTUP

KESIMPULAN

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban Akuntabilitas Pemerintah Daerah sekaligus dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain pencapaian tahun pelaporan 2017, juga disajikan pencapaian tahun sebelumnya dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum dari 51 indikator Nampak bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 telah berhasil mencapai kinerja sasaran, yang dapat dilihat 51 indikator masuk kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Satu indikator PMPRB dan SPIP tidak dapat dilakukan pengukuran karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan dua indikator lain tidak dapat dipersentasekan karena bersifat kualitatif dan hanya satu indikator yang masuk kriteria sangat rendah.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk memastikan Pencapaian Kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja Tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari Kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2017, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi Perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang ke depan. Pertama, walaupun beberapa

indikator telah mencapai target, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa di jawab dengan baik pula. Peran pemerintah Kota Padang Panjang sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan publik secara maksimal dapat terlaksana di Kota Padang Panjang dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan sehingga tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah Kota Padang Panjang dapat meningkat.

Kedua hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah Kota Padang Panjang dengan berbagai unsur di wilayah Kota Padang Panjang. Daerah yang berbatasan dengan Kota Padang Panjang maupun juga dengan pihak-pihak diluar pemerintah. Beberapa indikator seperti peningkatan pendapatan dan penurunan angka pengangguran menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergis yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting di pergunakan oleh instansi dilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan laporan kinerja benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

Tabel Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2017
Pemerintah Kota Padang Panjang

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	%Penyerapan Anggaran	Efisiensi
Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Terwujudnya pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi	269.20	98.92	170
	Meningkatnya kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota	100.00	88.22	12
	Penerapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	106.38		
Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	Meningkatnya angka melek huruf	100.00	58.54	41
Menuntaskan program belajar 12 tahun	Meningkatnya APM SD/MI/SDLB/Paket A	110.39		
	Meningkatnya APK SMP/MTsN/SMPLB /Paket B	116.87		
	Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/SM ALB/Paket C	114.14		
	Menurunnya angka putus sekolah			
	a. SD	156.25		
Membangun kecerdasan anak usia dini	Meningkatnya APK PAUD	100.91	89.80	11
Peningkatan PHBS	Meningkatnya tingkat kesembuhan penyakit menular TB Baru	112.70	59.08	54

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar	meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan	125.00		
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM RSUD	Meningkatnya persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi	185.82		
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB)	157.02	97.74	59
Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	Meningkatnya kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	103.19	92.54	11
Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatnya nilai investasi	121.98	98.07	24
Meningkatkan iklim usaha atau perdagangan yang kondusif	Terwujudnya penyelesaian sengketa konsumen	100.00		
Mengurangi timbulan sampah	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA	100.01	92.64	7
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan	meningkatnya pengelolaan drainase	103.48	89.64	14
	meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	161.30	93.81	67
	meningkatnya kualitas fasilitas lalu lintas	127.55	92.13	35
	meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum	162.69	91.04	72

Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat	persentase penurunan jumlah PMKS pertahun	138.75	90.26	48
Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	Jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ	102.88		
meningkatnya prestasi olahraga	meningkatnya jumlah cabang olahraga yang aktif	113.33		
meningkatnya kegiatan seni dan budaya	meningkatnya jumlah sanggar seni yang aktif	109.09		
meningkatnya pemberdayaan perempuan	IPG kota padang panjang	123.89	98.99	25
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang	100.00	80.81	19
Menekan angka kelahiran	menurunnya angka kelahiran	180.11	92.20	88

I. TINGKAT NASIONAL

1. Kota Padang Panjang berhasil meraih penghargaan Kota Adipura berupa "Adipura" Tahun 2017.
2. Kota Padang Panjang berhasil meraih Wahana Tata Nugraha Tahun 2017.
3. Penghargaan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai Daerah Tertib Ukur
4. Penghargaan untuk Pasar Induk Hasil Pertanian ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2017
5. Penghargaan untuk Pasar Pusat Padang Panjang ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2017
6. Anugerah Swasti Saba Wistara dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Kota Padang Panjang Tahun 2017
7. Anugerah Pastika Parama dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Kota Padang Panjang Tahun 2017
8. Sertifikat dari Kementerian Kesehatan republik Indonesia atas partisipasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2017
9. Sertifikat Akreditasi kepada Puskesmas Koto Katik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
10. Sertifikat Akreditasi kepada Puskesmas Kebun Sikolos dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
11. Penghargaan dari BPJS Kesehatan atas keberhasilan Pemerintah Kota Padang Panjang mencapai Universal Health Coverage
12. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 Kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

13. Penghargaan kepada Walikota Padang Panjang sebagai Inisiator Kota Padang Panjang Menuju Kota Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
14. Penghargaan Pemuda Pelopor Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata Tingkat Nasional kepada Yuliza Zein
15. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 15 Ngalau
16. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional MA Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang
17. Rekor Dunia dari MURI (Museum Rekor Indonesia) atas rekor Memasak Cangkuk di Tungku Terbanyak pada tanggal 26 November 2017.
18. Juara 1 Pemuda Pelopor Bidang Sosial, Budaya dan Pariwisata Nasional atas nama : Yuliza Zen, SE
19. Lomba Olig Tk. Internasional atas nama Derliana, MA
20. Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah Tk. Sumbar
21. Putri Jalur Genre Masyarakat oleh Zikril Husna
22. Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi paripurna
23. BKKBN Pusat
24. Kihajar

II. TINGKAT PROVINSI

1. Penghargaan GSB (Gerakan Sumbar Bersih) untuk Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2017
2. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi untuk SDN 17 Sigando
3. Juara 1 Lomba Berceita (Dinas Perpustakaan dan Arsip)
4. Pemeran Pria terbaik pada Pemilihan Media Tradisional an. Ranga Putra (Dinas Kominfo)
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan Dinas Terbaik dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Dinas Capil)

6. Juara 1 Lomba Totur Paket C atas nama Wahyuda Sari, S.Pd
 7. Juara 1 Lomba Duta Bahana Nusantara atas nama Anadilla Putri
 8. Juara 1 Seleksi OGN SMP IPS atas nama Lenni Ekawati, S.Pd
 9. Juara 1 Seleksi OGN SMP IPA atas nama Endar Madesa, M.Pd
 10. Juara 1 Lomba Tahfizh Tingkat SMP atas nama Akhlakul Karimah
 11. Juara II Stand Terbaik dalam acara Livestock Expo dan Kontes Ternak di Solok Selatan (Dinas Pangan dan Pertanian)
 12. Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat kepada Walikota Padang Panjang sebagai Kepala Daerah Penggiat Kerukunan Umat Beragama di Sumatera barat
-

